

**PENGARUH PENGEMBANGAN RUANG KAWASAN
PERKANTORAN TERHADAP PEMBANGUNAN
INFRAKSTRUKTUR LINGKUNGAN KECAMATAN BUNGKU
TENGAH KABUPATEN MOROWALI**

(Studi Kasus : Kawasan Perkantoran Bumi Fonuansingko Desa Bente)



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Teknik Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh


Muhammad. Farid A.W. Hasan

NIM. 60800112085

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Samata-Gowa,
Penyusun,

Muhammad. Farid A.W. Hasan
60800112085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Pengembangan Ruang Kawasan Perkantoran Terhadap Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali (Studi Kasus : Kawasan Perkantoran Bumi Fonuansingko Desa Bente).

Nama Mahasiswa : Muhammad Farid A.W. Hasan

NIM : 60800112085

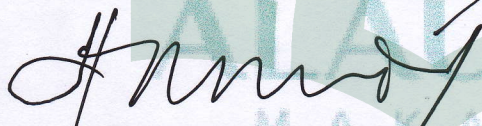
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota

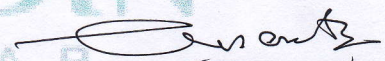
Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II


Ir. H. Syamsuddin Margolang, M.Si


Nursyam AS, ST, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

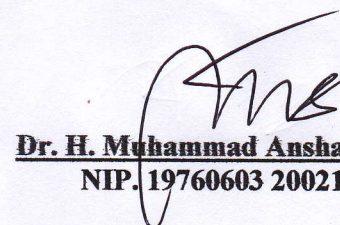
Mengetahui

 Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001


Dr. H. Muhammad Anshar, S.Pt. M.Si
NIP. 19760603 2002121 00 5

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pengaruh Pengembangan Ruang Kawasan Perkantoran Terhadap Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali (Studi Kasus : Kawasan Perkantoran Bumi Fonuansingko Desa Bente)” yang disusun oleh Muhammad Farid A.W. Hasan, NIM: 60800112085, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota.

Samata-Gowa, 17 Oktober 2017 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Dr. Wasilah, S.T., M.T
Sekretaris	:	Iyan Awaluddin, S.T., M.T.
Penguji I	:	Dr. Ir. Syahriar Tato, MH, MM
Penguji II	:	A. Idham AP, S.T., M.Si.
Penguji III	:	Dr. Wahyuddin G, M.Ag
Pembimbing I	:	Ir. H. Syamsuddin Margolang, M.Si
Pembimbing II	:	Nursyam AS, ST, M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



AssalamuAlaikumWr. Wb.....

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat penulis rampungkan tepat pada waktunya. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW., sebagai *uswatunhasanah* dan rahmat bagi seluruh alam. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains Dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Keberhasilan penulis tidak lepas dari dorongan motivasi berbagai pihak yang telah memberikan banyak bantuan, baik moril maupun materil. Sebagai bentuk penghargaan penulis, secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Keluarga besar penulis terkhusus Ibunda **Dra. Hj. Marhani Dollah** dan ayahanda **Drs. H. Abd. Wahid Hasan, M.Pd**, serta adinda **Inneke Dwi Fajrianti** dan **Nurfitriani AW Hasan** yang telah banyak memberikan dorongan moril dan materil serta kasih sayang yang tiada hentinya dari awal kuliah hingga selesainya tugas akhir ini.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababari, MS.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Bapak **Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi serta segenap dosen dan staf pada Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Terima kasih kepada seluruh dosen dan staf fakultas sains dan teknologi yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Ayahanda **Dr. Muhammad Ansar S,Pt, M.S.** dan Ibunda **Risma Handayani S.IP., M.Si.**, selaku ketua dan sekretaris jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta segenap staf dan dosen pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
6. Bapak **Ir. Syamsuddin, Margolang, M.Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Nursyam AS, ST., M.Si** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga rampungnya penulisan Tugas Akhir ini.
7. Dewan penguji ,Bapak **Dr. Ir. Drs. H. Syahriar Tato, SH, M.Si., M.S., MT., M.M.**, Bapak **A. Idham AP, ST., M.Si**, dan Bapak **Dr. Wahyuddin M.Ag** yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.
8. Terima kasih kepada pemerintah **Kabupaten Morowali, Kepala Kecamatan Bungku Tengah, dan Kepala Desa Bente**, yang telah banyak memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian penulis.
9. Terima kasih kepada Keluarga Besar **Himpunan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota** yang telah banyak memberikan proses tentang senioritas, solidaritas, dan Loyalitas dalam berlembaga.
10. Rekan-rekan, PWK yang telah memberikan dorongan dan semangat terutama untuk 112 Saudara-Saudariku di **PENTAGON Angkatan 2012** yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
11. Terima Kasih untuk saudara yang tak sedarah **Mapalasta UIN Alauddin Makassar angkatan diksar XXI** yang telah banyak membantu dalam segala hal yang tidak dapat disebut satu persatu

12. Terima kasih kepada **Ade Ayu Rone** yang terus memberikan motivasi serta semangat sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
13. Terima kasih kepada **Siti Rukmana, S.PWK , dan Akbar Mappagala, S.PWK** yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
14. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga dan teman- teman yang tidak sempat penulis tuliskan namanya satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun sehingga dapat mengarahkan kepada kesempurnaan. Penulis berharap semoga kehadiran Tugas Akhir ini dapat berguna bagi pembaca dan menambah literature kajian ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota pada khususnya dan disiplin ilmu lain pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan Pengembangan Infrastruktur. Wassalam.

Samata-Gowa, September 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Penulis
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama Penyusun : Muh. Farid A.W Hasan
Nim : 60800112085
Judul Skripsi : Pengaruh Pengembangan Ruang Kawasan Perkantoran Terhadap Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali (Studi Kasus : Kawasan Perkantoran Fonuansingko Desa Bente)

Perkembangan Kabupaten Morowali khususnya Kecamatan Bungku Tengah setiap tahunnya mengalami perkembangan baik dari aspek kebijakan infrastruktur maupun ekonomi. Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam perkembangan wilayah. Selain disebabkan karena adanya kawasan industri, pengembangan ruang kawasan perkantoran memiliki peran penting dalam meningkatnya pembangunan infrastruktur, hal ini disebabkan karena pusat pemerintahan Kabupaten Morowali yang berada di Desa Bente

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ketersediaan infrastruktur lingkungan dan melihat Pengaruh pengembangan ruang kawasan perkantoran terhadap pembangunan infrastruktur lingkungan, tujuan dari penelitian ini untuk menentukan tingkat ketersediaan infrastruktur dan untuk mengetahui pengaruh pengembangan ruang kawasan perkantoran terhadap pembangunan infrastruktur lingkungan. alat analisis yang digunakan mencakup pembobotan dan Spm serta deskripsi pengaruh pengembangan ruang kawasan perkantoran terhadap pembangunan infrastruktur Lingkungan di lokasi penelitian.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa ketersediaan infrastruktur di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah sudah cukup memadai atau dikategorikan sedang diantaranya jaringan jalan, jaringan listrik, dan aksesibilitas tingkat ketersediannya sangat tinggi, sedangkan jaringan air bersih tingkat ketersediaan sedang, namun untuk jaringan drainase, dan Sistem persampahan tingkat ketersediannya masih rendah, serta pengaruh pengembangan ruang kawasan perkantoran terhadap pembangunan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, dan aksesibilitas yaitu berpengaruh sangat tinggi (pengaruh tinggi), untuk infrastruktur jaringan air bersih yaitu cukup dipengaruhi (pengaruh sedang), sedangkan untuk infrastruktur jaringan drainase dan sistem persampahan memiliki pengaruh tidak cukup terpengaruhi (pengaruh rendah).

Kata Kunci : Pengaruh, Infrastruktur, Perkantoran

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengembangan Wilayah.....	19
B. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota	12
C. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan	18

D. Kawasan Pusat Pemerintahan	24
E. Pengaruh Pengembangan Kawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur.....	26
F. Standar Pelayanan Minimum Prasarana Lingkungan Perumahan	31
G. Kerangka Pikir	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
1. Jenis Data	40
2. Sumber Data.....	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	42
E. Variabel Penelitian.....	43
F. Metode Analisis Data.....	44
G. Definisi Operasional.....	51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Morowali.....	52
1. Letak Geografis dan Administrasi	52
2. Kondisi Fisik Dasar	55
B. Gambaran Umum Kecamatan Bungku Tengah	60
1. Letak Geografis dan Administrasi	60
C. Gambaran Lokasi Penelitian	64

1. Letak Geografis dan Administrasi Lokasi Penelitian.....	64
2. Aspek Kependudukan	66
3. Penggunaan Lahan	68
D. Kondisi Infrastruktur.....	71
1. Jaringan Jalan.....	71
2. Jaringan Air Bersih	74
3. Jaringan Listrik.....	75
4. Jaringan Drainase	76
5. Sistem Persampahan.....	77
6. Aksesibilitas	79
E. Hasil Analisis Ketersediaan Infrastruktur Kawasan Penelitian ..	87
1. Jaringan Jalan.....	87
2. Jaringan Air Bersih	88
3. Jaringan Listrik.....	90
4. Jaringan Drainase.....	94
5. Sistem Persampahan.....	95
6. Aksesibilitas	98
F. Rekapitulasi Hasil Ketersediaan Infrastruktur Pada Lokasi Penelitian.....	100
G. Pengaruh Pengembangan Ruang Kawasan Perkantoran Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Kawasan Penelitian	101
1. Jaringan Jalan	101

2. Jaringan Air Bersih	102
3. Jaringan Listrik.....	102
4. Jaringan Drainase	102
5. Sistem Persampahan.....	103
6. Aksesibilitas	103
H. Kajian Hukum Islam Tentang Pengaruh Pengembangan Ruang Kawasan Perkantran Terhadap Pembangunan Infrastruktur Lingkungan	104
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Standar pelayanan Minimal Jaringan Jalan	31
TABEL 2. Standar Pelayanan Minimal Jaringan Air Bersih	32
TABEL 3. Standar Pelayanan Minimal kebutuhan Jaringan Listrik.....	33
TABEL 4. Standar Pelayanan Minimal kebutuhan Jaringan Listrik untuk perumahan	34
TABEL 5. Standar Pelayanan Minimal Jaringan Listrik	34
TABEL 6. Standar Pelayanan Minimal Jaringan Drainase.....	35
TABEL 7. Standar Pelayanan Minimal Jaringan Persampahan	36
TABEL 8. Penentuan Kategori dengan Skala Likert	49
TABEL 9. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Kabupaten Morowali	54
TABEL 10. Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Morowali	56
TABEL 11. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Kecamatan Bungku Tengah	61
TABEL 12. Jumlah dan Laju pertumbuhan Penduduk Desa Bente Tahun 2012- 2016.....	66
TABEL 13. Perkembangan Penduduk di Desa Bente Tahun 2012- 2016	67
TABEL 14. Penggunaan Lahan Pada Lokasi Penelitian	68
TABEL 15. Kondisi Jaringan Jalan Desa Bente Tahun 2017	72
TABEL 16. Kondisi Jaringan Drainase Desa Bente Tahun 2017	77

TABEL 17. Ketersediaan Jaringan Jalan tahun 2017	87
TABEL 18. Ketersediaan Jaringan Air Bersih tahun 2017	89
TABEL 19 Ketersediaan Jaringan Listrik tahun 2017	92
TABEL 20. Ketersediaan Jaringan Drainase tahun 2017	95
TABEL 21. Ketersediaan Sistem Persampahan tahun 2017	97
TABEL 22. Hasil Analisis Ketersediaan	
Tingkat Aksesibilitas tahun 2017	99
TABEL 23. Hasil Rekapitulasi Infarstruktur	100



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. Grafik Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten	
Morowali	54
GAMBAR 2. Peta Administrasi Kabupaten Morowali.....	59
GAMBAR 3. Grafik Pembagian Daerah Administrasi Kecamatan	
Bungku Tengah	62
GAMBAR 4. Peta Administrasi Kecamatan Bungku Tengah	63
GAMBAR 5. Peta Adiminstrasi Desa Bente	66
GAMBAR 6. Peta Penggunaan Lahan.....	69
GAMBAR 7. Peta Zonasi	70
GAMBAR 8. Kondisi PDAM.....	74
GAMBAR 9. Penerangan Jalan Desa Bente	76
GAMBAR 10. Jaringan Listrik Desa Bente.....	76
GAMBAR 11. Kondisi Drainase	77
GAMBAR 12. Pengelolaan Individual	78
GAMBAR 13. Pengelolaan Komunal.....	78
GAMBAR 14. Kondisi Jalan	79
GAMBAR 15. Peta Fungsi Jaringan Jalan	80
GAMBAR 16. Peta Kondisi Jaringan Jalan.....	81
GAMBAR 17. Jaringan Air Bersih.....	82
GAMBAR 18. Peta Jaringan Listrik	83
GAMBAR 19. Peta Fungsi Jaringan Drainase.....	84
GAMBAR 20. Peta Kondisi Jaringan Drainase.....	85

GAMBAR 21. Peta Sistem Persampahan	86
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Purba dalam Panjaitan (2012), dijelaskan bahwa kawasan pemerintahan merupakan tempat untuk melaksanakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pemerintahan, baik itu kegiatan politik dan administratif, serta segala kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal mengenai politik dan pemerintahan. Salah satu tujuan dari direncanakannya kawasan tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dimana hal itu tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sendiri dalam melaksanakannya.

Berdasarkan hal tersebut maka, salah satu tujuan dari direncanakannya kawasan tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dimana hal itu tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sendiri dalam melaksanakannya. Banyak hal yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam suatu daerah, salah satu diantaranya adalah melalui aspek desain, yaitu melalui perancangan kawasan pemerintahannya.

Anthony J dalam Thaher, (2010), dijelaskan bahwa keberadaan infrastruktur mempunyai dampak yang sangat besar bagi mutu kehidupan masyarakat, pola pertumbuhan dan prospek perkembangan ekonominya. Selain itu pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi sumberdaya alam akan mampu mempercepat pengembangan wilayah.

Berdasarkan dalam peraturan daerah Kabupaten Morowali nomor 10 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Morowali tahun 2012 – 2032 pembangunan infrastruktur lingkungan ditetapkan yaitu jaringan jalan kolektor primer yaitu ruas jalan Wosu – Bungku – Bahodopi, jaringan jalan lokal sekunder yaitu ruas jalan dalam kota Bungku, jaringan jalan strategis Kabupaten yang merupakan kewenangan Kabupaten yaitu ruas jalan kolektor pasar Bungku dan ruas jalan kota terpadu mandiri (KTM) Bungku, sistem jaringan energi yaitu pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) terdapat di Desa Bahoruru, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) terdapat di Desa Sakita, jaringan transmisi gardu induk terdapat di Desa Bahoruru Kecamatan Bungku Tengah, sistem jaringan selalu terdapat di semua Kecamatan Kabupaten Morowali, prasarana air baku untuk air bersih terdapat di Desa Sakita, Desa Ipi, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Tempat penampungan sementara (TPS) terdapat di semua desa dan Kelurahan di Kecamatan Bungku tengah, sistem jaringan air minum perpipaan perkotaan disetiap Kecamatan, sistem jaringan air non perpipaan perkotaan terdapat di setiap kota Kecamatan, sistem jaringan air minum non perpipaan pedesaan terdapat diseluruh desa, pengembangan instalasi pengolahan air terdapat di Bungku Tengah (50- 100 l/ dt), sistem sanitasi off site perkotaan di Bungku Tengah, sistem jaringan drainase di desa Ipi, desa Bente, Desa Bahomohoni, sistem jaringan drainase di daerah perdagangan/komersial terdapat di Bungku Kecamatan Bungku Tengah.

Kabupaten Morowali memiliki potensi sektor industri, pertanian, perikanan, dan perkebunan. Ibu Kota Kabupaten terletak di Kecamatan Bungku Tengah dengan luas wilayah 725,57 Km², dengan jumlah penduduk 22.668 jiwa. Adapun ibu kota Kecamatan yaitu Kelurahan Marsaoleh namun untuk kawasan pusat pemerintah terletak Desa Bente dengan luas kawasan yaitu 1,5 km² (BPS Kabupaten Morowali, 2015).

Perkembangan Kabupaten Morowali khususnya Kecamatan Bungku Tengah setiap tahunnya mengalami perkembangan baik dari aspek infrastruktur maupun ekonomi. Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam perkembangan wilayah. Selain disebabkan karena adanya kawasan industri, pengembangan ruang kawasan perkantoran memiliki peran penting dalam meningkatnya pembangunan infrastruktur, hal ini disebabkan karena pusat pemerintahan Kabupaten Morowali yang berada di Desa Bente yang menyebabkan penduduk dari luar daerah yang berprofesi sebagai pegawai negeri maupun pegawai honorer tertarik tinggal disekitar kawasan perkantoran sehingga terjadi peningkatan kebutuhan lahan kawasan permukiman, selain itu penduduk yang bermukim disekitar kawasan perkantoran menyebabkan juga timbulnya aktivitas perdagangan dan jasa disekitar perkantoran.

Selain itu dengan adanya pengembangan kawasan perkantoran mempengaruhi peningkatan pembangunan jaringan jalan dari tahun 2009 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, dengan jenis jalan aspal dan terjadi perubahan status jalan di beberapa ruas jalan yang berada di dalam kompleks perkantoran, yaitu dari status jalan lingkungan menjadi jalan kolektor. Infrastruktur lainnya yaitu jaringan listrik

mengalami peningkatan kebutuhan jaringan listrik karena banyaknya pembangunan di sekitar kawasan perkantoran , serta lampu jalan di sepanjang jalan kolektor , kemudian untuk pembangunan infrastruktur jaringan drainase disekitar kawasan perkantoran masih sangat kurang sehingga jika terjadi hujan yang deras dapat menimbulkan tergenangnya air di sebagian ruas jalan kawasan perkantoran, untuk pembangunan infrastruktur jaringan air bersih disekitar kawasan perkantoran sudah menggunakan air pdam, namun infrastruktur jaringan persampahan di Kabupaten Morowali belum memiliki tempat pembuangan akhir (Tpa), sehingga sampah yang berada disekitar kawasan perkantoran di olah secara individual.

Allah SWT berfirman dalam QS. Qaff/ 50: 6 yaitu :

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۖ

Terjemahnya :

“Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada diatas mereka, bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya, dan tidak terdapat retak-retak sedikitpun”. (Kementrian Agama RI 2011 : 747)

Dimana maksud ayat tersebut bahwa allah menciptakan langit secara terstruktur dimana didalam struktur tersebut terdapat unsur- unsur yang saling membentuk yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama sehingga membentuk suatu sistem yang kokoh sehingga kehidupan tetap berjalan. Jika salah satu unsur tersebut terjadi kerusakan maka terjadi malapetaka begitupun struktur ruang dimana merupakan kumpulan pusat - pusat permukiman sistem jaringan infrastruktur yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh pengembangan ruang kawasan perkantoran terhadap pembangunan infrastruktur lingkungan Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali (Studi Kasus : Kawasan Perkantoran Bumi Fonuansingko Desa Bente)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang di atas, maka untuk memudahkan proses penelitian guna menghindari pembahasan yang terlalu meluas diperlukan adanya perumusan masalah. Berangkat dari pernyataan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu,

1. Bagaimana tingkat ketersediaan infrastruktur lingkungan di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali,
2. Bagaimana pengaruh pengembangan ruang kawasan perkantoran terhadap pembangunan infrastruktur lingkungan Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui tingkat ketersediaan infrastruktur di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali
- b. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan ruang kawasan perkantoran terhadap pembangunan infrastruktur lingkungan Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

2. Manfaat

- a. Secara Akademis

Diharapkan penelitian ini sebagai bahan kajian (referensi) bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan ruang kawasan perkantoran.

- b. Secara praktis

Menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Morowali dalam mengembangkan kawasan perkantoran.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi ruang lingkup dalam pelaksanaan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian dalam hal ini adalah di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali yang merupakan kawasan pusat pemerintahan.

2. Materi

Ruang lingkup materi dan penelitian ini yaitu membahas mengenai Pengaruh pengembangan ruang kawasan perkantoran terhadap pembangunan infrastruktur Lingkungan.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang terdapat pada penelitian ini adalah secara berurutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Uraian ini berisi pendahuluan yang merupakan rangkaian penelitian meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan beberapa literature dan pengertian yang nantinya akan digunakan sebagai dasar teori dalam membahas yang dikemukakan serta berisi kerangka pikir penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, metode penelitian, dan definisi operasional.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum wilayah Kabupaten Morowali dan gambaran umum Kecamatan Bungku Tengah , gambaran umum lokasi penelitian, deskriptif variabel penelitian, analisis pengembangan kawasan, ketersediaan infrastruktur, analisis korelasi, serta konsep kajian Al-Quran.

BAB V

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal ini berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain.

Menurut Rustiadi, (2011), dijelaskan bahwa wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

Konsep wilayah yang paling klasik Hagger,(1977), dijelaskan mengenai tipologi wilayah, mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) wilayah homogen (*uniform/homogenous region*); (2) wilayah nodal (*nodal region*); dan (3) wilayah perencanaan (*planning region atau programming region*). (Rustiadi, 2011 :27)

Menurut Saefulhakim , dkk (2002), dijelaskan bahwa wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pewilayahan (penyusunan wilayah) adalah pendelineasian unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional (tolong menolong, bantu membantu, lindung melindungi) antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Wilayah Pengembangan adalah pewilayahan untuk tujuan pengembangan/ pembangunan/ *development*. Tujuan-tujuan pembangunan terkait dengan lima kata kunci, yaitu: (1) pertumbuhan; (2) penguatan keterkaitan; (3) keberimbangan; (4) kemandirian; dan (5) keberlanjutan. Sedangkan konsep wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan. (Jahid , 2012 : 91- 93).

Pengertian pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan

dan pemerataan, penekanan kepada kebutuhan dasar (*basic need approach*), pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Menurut Anwar dalam notestalk. wordpress, (2009)., dijelaskan bahwa pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah

Bourne dalam Wijaya, (2006), dijelaskan bahwa kota baru yang sengaja dibangun untuk aktivitas pemerintahan, dirancang sebagai kota mandiri, dengan menyediakan aktivitas (pekerjaan) bagi penduduknya agar kota baru dapat menjadi tempat bermukim para pendatang.

Menurut sujarto dalam perencanaan kota blogspot, (2014), dijelaskan bahwa sesuai dengan fungsi dan tujuan kota baru sangat bervariasi dari segi lokasi jenis, serta pola fisiknya. Namun secara fungsional kota baru dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Kota penunjang yaitu kota baru yang direncanakan dan dikembangkan dalam kaitan dengan kota yang telah tumbuh dan berkembang, jenis kota baru demikian membantu memecahkan masalah kota yang sudah ada misalnya untuk memecahkan masalah keruangan, perumahan atau dalam perluasan kota.

2. Kota Mandiri yaitu kota yang direncanakan dan dikembangkan tersendiri, meski fungsinya sama dengan kota-kota yang telah tumbuh dan berkembang, tetapi kota-kota ini dikembangkan dengan fungsi khusus berkaitan dengan potensi tertentu. Kota baru demikian dapat dikatakan sebagai independent town atau self sufficient new town atau kota mandiri baru. Secara ekonomi dan sosial dapat memenuhi kebutuhan sendiri paling tidak sebagian besar penduduknya. Secara geografis, kota baru mandiri di wilayah tersendiri yang berjarak cukup jauh dari kota yang sudah ada. Secara fisik, terpisah oleh wilayah bukan permukiman seperti pertanian, hutan, jalur hijau atau wilayah non urban lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

B. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota

Rencana struktur ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria :

1. Memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten / kota yang berbatasan.
2. Jelas realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan.
3. Penentuan pusat- pusat pelayanan di dalam struktur ruang kota harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang kota serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem.

4. Sistem jaringan prasarana kota dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya.

Dalam rencana struktur tata ruang wilayah kota, terdapat unsur- unsur yang perlu diatur dan disediakan yang mengikuti dan membentuk struktur ruang wilayah kota, yaitu :

1. Sistem Prasarana Utama

Sistem Prasarana utama yang merupakan sistem jaringan transportasi, yang terdiri atas :

a. Jaringan Transportasi Darat

Jaringan Transportasi darat mencakup sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, dan sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyebrangan.

1) Sistem jaringan jalan terdiri atas :

- a) Jaringan jalan tol di dalam wilayah kota dan jaringan jalan sekunder di dalam kota sesuai dengan PP No.34 tahun 2006 tentang jalan
- b) Jaringan jalan provinsi
- c) Jalan Khusus yang berada di wilayah kota
- d) Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum.

2) Sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyebrangan

b. Jaringan transportasi laut

c. Jaringan transportasi udara.

2. Sistem Prasarana Lainnya

Sistem prasaran lainnya, seperti telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan infrastruktur perkotaan yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kota.

a. Sistem jaringan energi/ kelistrikan

Rencana pembangunan sistem jaringan energi/ kelistrikan dapat meliputi :

- 1) Pembangkit listrik (skala besar maupun mikro) di wilayah kota.
- 2) Jaringan prasarana energi mencakup :
 - a) Penjabaran jaringan pipa minyak dan gas bumi, dalam wilayah kota (jika ada).
 - b) Penjabaran jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan ultra tinggi (sutut), saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet), dan saluran udara tegangan tinggi (sutt) dalam wilayah kota (jika ada).
 - c) Jalur - jalur distribusi energi kelistrikan, lokasi pembangkit, gardu induk distribusi, dan sistem distribusi.
 - d) Rencana sistem alternatif sumber daya lainnya seperti, migas, panas bumi, dan tenaga surya .

b. Sistem jaringan telekomunikasi

Rencana sistem jaringan telekomunikasi yang di kembangkan seperti meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit, yang terdiri atas :

- 1) Rencana pembangunan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon fixed line dan lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon.
- 2) Infrastruktur telpon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara base transceiver station (bts).
- 3) Rencana peningkatan jalan jaringan telekomunikasi di wilayah kota.
- 4) Rencana sistem jaringan sumber daya air kota.

c. Sistem jaringan air bersih

Rencana sistem jaringan sumber daya air kota dikembangkan yang terdiri atas :

- 1) Sistem jaringan sumber daya lalu lintas negara, lintas provinsi, dan lintas kabupaten / kota yang berada pada wilayah kota bersangkutan.
- 2) Wilayah sungai di wilayah kota, termasuk waduk, situ, dan embung pada wilayah kota.
- 3) Sistem jaringan irigasi yang berfungsi mendukung kegiatan pertanian wilayah kota.
- 4) Sistem jaringan air baku untuk air bersih.
- 5) Sistem pengendalian banjir di wilayah kota.

3. Infrastruktur Perkotaan

Infrastruktur perkotaan dapat meliputi prasarana penyediaan air minum kota, pengelolaan air limbah, sistem persampahan, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana.

a. Sistem penyediaan air minum kota

Sistem penyediaan air minum kota mencakup sistem jaringan perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan.

b. Sistem pengelolaan air limbah kota

Sistem pengelolaan air limbah kota meliputi sistem air pembuangan yang terdiri atas sistem pembuangan air limbah (sewage) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sistem pembuangan air buangan rumah tangga (sewerage) baik individual maupun komunal.

Untuk air limbah yang mengandung B3, diperlukan instalasi tambahan untuk membersihkan air limbah tersebut sebelum masuk ke jaringan air buangan kota.

c. Sistem persampahan kota

Sistem persampahan kota meliputi tempat penampungan sampah sementara (TPS) dan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).

d. Sistem drainase kota

Sistem drainase kota meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier yang berfungsi untuk mengalirkan limpasan air hujan (storm air) dan air permukaan lainnya untuk menghindari genangan air di wilayah kota.

e. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dapat direncanakan dalam bentuk ruang pejalan kaki di sisi jalan, ruang pejalan kaki disisi air, ruang pejalan kaki di kawasan komersial / perkantoran, ruang pejalan kaki di RTH, ruang pejalan kaki di bawah tanah, dan ruang pejalan kaki di atas tanah.

f. Jalur evakuasi bencana

Jalur evakuasi bencana meliputi escape way dan melting pont baik dalam skala kota, kawasan, maupun lingkungan.

g. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya

Disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kota, prasarana, dan sarana perkotaan lainnya dapat direncanakan penyediaan dan pemanfaatannya, seperti untuk kebutuhan pengguna sepeda, jalur trem, dan transportasi sungai. (Nursyam ,2013 :20-21).

C. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan

Infrastruktur adalah Fasilitas- fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen- agen publik untuk fungsi- fungsi pemerintahan dalam penyediaan air bersih, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan- tujuan ekonomi dan sosial.

Secara lebih luas dapat dikatakan bahwa infrakstruktur adalah bangunan atau fasilitas- fasilitas dasar, peralatan- peralatan, dan instalasi- instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya suatu sistem tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Infrakstruktur merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem, sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Anthony J dalam Thaher, (2010), dijelaskan bahwa keberadaan infrastruktur ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi mutu kehidupan masyarakat, pola pertumbuhan dan prospek perkembangan ekonominya. Namun sejauh ini tidak disadari oleh masyarakat. Terlihat banyak infrastruktur dan sarana lingkungan yang dibangun oleh pemerintah kurang mendapat perhatian dari masyarakat dalam hal pemeliharannya. Infrastruktur permukiman ini berfungsi untuk pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam kaitan dengan persoalan pengembangan wilayah, kegagalan pembangunan infrastruktur permukiman lebih disebabkan karena tidak melibatkan masyarakat sebagai pengguna ruang baik dalam hal perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemeliharannya. Mengingat infrastruktur merupakan unsur strategis dalam mewujudkan struktur pertumbuhan dan

perkembangan suatu kota, dan merupakan pendukung bagi perkembangan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial perkotaan.

Maka infrastruktur ini harus dikenali dalam kaitan dengan kegiatan dan fungsi sosial dan ekonomi wilayah yang didukung dan dipelopornya. Misalnya kualitas lingkungan perumahan dipengaruhi oleh kualitas lingkungan fisik, kualitas dan tingkat penyediaan fasilitas pelayanan (infrastruktur), serta keberadaan tingkah laku sosial masyarakatnya. Melihat pentingnya pembangunan infrastruktur permukiman ini, maka keberadaannya ini harus benar-benar tepat guna, artinya tepat tempatnya dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Dalam merumuskan perencanaan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang menjadi prasyarat mutlak untuk dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sesuai kebutuhan masyarakat baik yang mampu disediakan maupun tidak oleh pemerintah. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Pendanaan

Dana tersebut mutlak tersedia sehingga keberadaannya menjadi prioritas utama. Dengan keterbatasan dana inilah maka muncul urutan prioritas dari apa yang akan dibangun, sehingga perencanaan yang matang menjadi acuan untuk menghindari kegagalan pelaksanaan pembangunan.

2. Kelembagaan

Keberadaan lembaga pengelola yang menangani masalah perencanaan infrastruktur harus ditunjang oleh kemampuan manajemen pengelolaan. Mulai dari

siapa yang merencanakan, melaksanakan, sampai pada yang memelihara hasilnya nanti.

3. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakatnya juga dapat menentukan perencanaan infrastruktur permukiman untuk wilayahnya. Masyarakat berpenghasilan tinggi akan membutuhkan infrastruktur yang berbeda dengan masyarakat berpenghasilan rendah, baik dalam kualitas maupun jenisnya.

4. Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis yang tinggi dari perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, tidak saja akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik, namun dapat pula menekan biaya pembangunan. Kemampuan teknis ini diperlukan dalam suatu perencanaan pembangunan infrastruktur mengingat dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur selalu tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan.

5. Kondisi Fisik Lingkungan

Fisik lingkungan akan mempengaruhi sistim perencanaan, topografi yang datar akan lebih mudah direncanakan dari pada yang terlalu curam. Selain topografi, kondisi fisik lingkungan yang mempengaruhi perencanaan infrastruktur permukiman adalah hidrologi, curah hujan, geologi tata lingkungan dan struktur tanah.

6. Bencana Alam

Faktor bencana alam sangat diperlukan sebagai pertimbangan dalam merancang dan membangun infrastruktur. Untuk mengurangi kerusakan akibat bencana maka harus memperhatikan konfigurasinya (bentuk, ukuran, ketinggian, dan orientasinya) ,

intensitas dan frekuensi ancaman bencana di suatu wilayah, standarstandar rancangan struktural dan non struktural, pilihan bahan/material inti dan pendukung serta kualitas konstruksinya.

7. Peran serta Masyarakat

Pengembangan infrastruktur suatu kota/wilayah tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan, walaupun penentu kebijakan masih merupakan kewenangan pemerintah. Partisipasi masyarakat diartikan keikutsertaan, keterlibatan, dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan dan material yang diperlukan.

Kodoatie dalam Firdaus, (2009), dijelaskan bahwa infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitasfasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka infrastruktur terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.
3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaannya diatur pemerintah, yaitu: infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar, karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah.

Dalam undang-undang No.1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, infrastruktur adalah utilitas umum yaitu kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian, seperti jaringan transportasi, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan pemadam kebakaran. Utilitas umum ini membutuhkan pengelolaan secara berkelanjutan dan profesional oleh badan usaha agar dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Infrastruktur

permukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman, dimana kelengkapan dasar fisik ini berupa prasarana utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman yaitu :

- a. Jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur.
- b. Jaringan pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan.
- c. Jaringan drainase untuk menghindari dan pencegahan banjir setempat
- d. Jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan minimal air minum pada kawasan permukiman
- e. Sistem persampahan untuk menunjang kesehatan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah yang memadai, yaitu sistem pengelolaan yang aman, nyaman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Infrakstruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrakstruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengolahan limbah, listrik, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional. Infrakstruktur selain

fasilitasi akan tetap dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat.

D. Kawasan Pusat Pemerintahan

Soenkarno dalam Panjaitan, (2012), dijelaskan bahwa ibukota kabupaten, yaitu kota tempat kedudukan pusat pemerintahan kabupaten, dalam perkembangannya dapat menjelma menjadi kota yang makin mempunyai ciri dan tingkat kemajuan yang memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai Kota. Bila tahap perkembangan yang demikian itu terjadi, dijumpai suatu dilema karena Kota dan Kabupaten mempunyai tingkat yang sama tatarannya dari segi hierarki administrasi pemerintahan.

Purba dalam Panjaitan, (2012), dijelaskan bahwa kawasan pemerintahan merupakan tempat untuk melaksanakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pemerintahan, baik itu kegiatan politik dan administratif, serta segala kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal mengenai politik dan pemerintahan. Salah satu tujuan dari direncanakannya kawasan tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dimana hal itu tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sendiri dalam melaksanakannya.

Banyak hal yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam suatu daerah, salah satu diantaranya adalah melalui aspek desain, yaitu melau

perancangan kawasan pemerintahannya. Kawasan pemerintahan merupakan tempat untuk melaksanakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pemerintahan, baik itu kegiatan politik dan administratif, serta segala kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal mengenai politik dan pemerintahan.

Salah satu tujuan dari direncanakannya kawasan tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dimana hal itu tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sendiri dalam melaksanakannya. Banyak hal yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam suatu daerah, salah satu diantaranya adalah melalui aspek desain, yaitu melalui perancangan kawasan pemerintahannya.

Hamid dalam Panjaitan, (2012), dijelaskan bahwa ada beberapa faktor dan indikator untuk menentukan lokasi atau wilayah calon ibukota kabupaten yaitu meliputi:

- a. Faktor lingkungan makro adalah dorongan lingkungan baik dari dalam maupun dari luar seperti dorongan ketersediaan ruang atau lahan untuk menjadikan ibu kota kabupaten sebagai pusat pemerintahan, pusat pengendalian dan pertumbuhan pembangunan. Pusat jasa perdagangan dan jasa sosial lainnya tentu memerlukan ruang atau lahan yang luas karena tidak saja lahan yang disediakan hanya untuk perkantoran tetapi juga untuk kepentingan kegiatan ekonomi sosial.
- b. Faktor endowment daerah yaitu ketersediaan SDM yang memadai dan SDA yang potensial serta tingkat pengetahuan masyarakat yang cukup sebagai calon warga

ibukota kabupaten, sedangkan yang dimaksudkan dengan SDA yang potensial adalah ketersediaan sumber air, tanah dan lain sebagainya.

- c. Faktor budaya yang meliputi sifat dan perilaku masyarakat, adat istiadat yang memberikan dukungan terhadap penetapan ibukota kabupaten.

Disamping faktor-faktor tersebut ikut menentukan kelayakan lokasi ibukota Kabupaten yaitu daya dukung alam seperti yang disebut diatas antaranya lahan dan sumber air, akses kemudahan pelayanan serta ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan raya yang ada sehingga dapat meringankan beban pembiayaan infrastruktur dan sekaligus telah berfungsi dengan dimulainya pembangunan sarana pemerintahan didalam wilayah ibukota kabupaten.

E. Pengaruh Pengembangan Kawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur

Soegijoko dalam Thaher, (2010), dijelaskan bahwa interaksi dan kompetisi antar kota menjadi makin intensif yang dipacu oleh kemajuan transportasi dan komunikasi. Ini akan menghasilkan diferensias perkembangan perkotaan. Kota-kota yang unggul akan berkembang lebih cepat, membentuk aglomerasi, menjadi sasaran pendatang dan mengalami persoalan tekanan penduduk. Pada tahap klimaks, berbagai fungsi perkotaan sudah terbentuk lengkap. Selain itu kota-kota semakin terintegrasi yang ditunjang oleh kemajuan perhubungan. Desentralisasi penduduk dari kota-kota besar mulai berlangsung.

Wdyaningsih dalam Wijaya , (2006), dijelaskan bahwa variabel yang berpengaruh dalam proses perkembangan kota adalah:

1. Penduduk, keadaan penduduk, proses penduduk, lingkungan sosial penduduk.
2. Lokasi yang strategis, sehingga aksesibilitasnya tinggi.
3. Fungsi kawasan perkotaan, merupakan fungsi dominan yang mampu menimbulkan
4. Kelengkapan fasilitas sosial ekonomi yang merupakan faktor utama timbulnya perkembangan dan pertumbuhan pusat kota.
5. Kelengkapan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk ke segala arah Faktor kesesuaian lahan.
6. Faktor kemajuan dan peningkatan bidang teknologi yang mempercepat proses pusat kota mendapatkan perubahan yang lebih maju.

Tarigan dalam Wijaya, (2006), dijelaskan bahwa fasilitas perkotaan atau fungsi perkotaan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pusat perdagangan, yang digunakan untuk melayani masyarakat kota itu sendiri, melayani masyarakat kota dan daerah pinggiran, melayani beberapa kota kecil (pusat kabupaten), melayani pusat provinsi dan pusat beberapa provinsi sekaligus.
2. Pusat pelayanan jasa baik jasa perorangan maupun jasa perusahaan.
3. Tersedianya prasarana perkotaan, seperti sistem jalan kota yang baik, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air minum, pelayanan sampah, sistem drainase, taman kota, atau pasar.

4. Pusat penyediaan fasilitas sosial atau seperti prasarana pendidikan (universitas, akademi, SLTP, SD), prasarana kesehatan, tempat ibadah, prasarana olahraga, prasarana sosial seperti gedung pertemuan, dan lain-lain.
5. Pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan turut mempercepat tumbuhnya suatu kota karena banyak masyarakat yang perlu datang ke tempat itu untuk urusan pemerintahan.
6. Pusat komunikasi dan transportasi.
7. Lokasi pemukiman yang tertata.

Sugijanto dalam Meiriki, (2014), dijelaskan bahwa dalam GBHN pembanguana daerah diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar kota, antar desa, dan antar desa dengan kota. Selain itu membuka dan mempercepat Kawasan Timur Indonesia, daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah yang bersangkutan. Dengan demikian akan terwujud pola pembangunan yang merupakan perwujudan wawasan nusantara. Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh pelosok tanah air.

Pusat pemerintahan merupakan daerah inti bagi pengembangan dan pembangunan suatu kawasan, karena semua unsur pokok dan struktur ruang akan diambil dan diterapkan dipusat pemerintahan. Pusat pemerintahan sangat erat kaitannya dengan konsep perwilayahannya dan pembangunan serta konsep peran kota dan lokasi dalam pengembangan wilayah. Pusat pemerintahan jika dilihat dari konsep administratif merupakan suatu daerah sebagai lokasi kegiatan pembangunan berdasarkan keputusan-keputusan dimana kebijaksanaan pemerintah ditetapkan, seperti Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan.

Hanifah dalam Meiriki,(2004), dijelaskan bahwa kota sebagai pusat pemerintahan merupakan tempat konsentrasi penduduk dengan berbagai macam variasi kegiatan dari berbagai sektor yang mempunyai tingkat spesialisasi yang tinggi dan terletak pada lokasi yang cukup akses, serta dipandang sebagai daerah modern, dinamis dan inovatif dan juga merupakan bentuk permukiman penduduk yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pelayanan sosial. Berdasarkan fungsinya sebagai pusat suatu wilayah, maka kota akan berperan sebagai pusat koleksi dan distribusi arus produksi, kapital dan jasa yang memperlihatkan hubungan ketergantungan timbal balik.

Ibrahim dalam Meiriki,(2004), dijelaskan bahwa kota sebagai pusat pemerintahan tidak terbatas pada kota- kota besar saja, tetapi kota – kota yang masi kecil, yang mempunyai potensi untuk meningkatkan daya pembangunannya dan dapat pula menempati sebagai pusat pertumbuhan. Sebagai ilustrasi adalah pembukaa

permukiman – permukiman transmigrasi baru, atau penemuan – penemuan sumber – sumber mineral baru pada tempat – tempat yang terpencil, sehingga mampu meramaikan kegiatan- kegiatan perdagangan pada kota- kota kecil yang berada disekitarnya. Apabila kota- kota kecil itu dapat mengembangkan berbagai fasilitas perdagangan secara lebih baik, maka kota tersebut akan berkembang menjadi kota yang lebih besar yang akan mendorong kegiatan- kegiatan produksi di daerah rural hinterlandnya. Kota- kota ini sering dinamakan agro urban center yang dapat berbentuk ibu kota – ibu kota kecamatan atau sekedar suatu “kota pasar” yang lebih kecil dari.

Perroux dalam Meiriki, (2004), dijelaskan bahwa Perencanaan pembangunan suatu wilayah tidak terlepas dari aspek wilayah tersebut sebagai suatu kutup atau pusat pemerintahan. Kutup pertumbuhan merupakan suatu konsep yang pertama kali ditemukan oleh Perroux pada tahun 1950. Perroux menyebutkan bahwa pertumbuhan tidak bisa terjadi dimana saja dan pada waktunya yang bersamaan. Pertumbuhan hanya terjadi pada tempat- tempat tertentu yang disebutnya sebagai kutup pertumbuhan, dengan intensitas yang berbeda-beda.

Seperti yang dikutip oleh Hanfiah dalam Meiriki (2004), lebih menekankan kutup pertumbuhan dimensi ruang ekonomi yang mengandung pusat- pusat dan kutub- kutub serta mempunyai kekuatan sentrifugal yang memancarkan kesekelilingnya dan kekuatan sentripetal yang menarik kawasan sekitarnya kepusat pusat tersebut, tiap-tiap pusat merupakan pusat penarik dan penolak serta mempunyai medan sendiri dalam suatu gugusan medan pusat- pusat yang lain.

Glasson dalam Meiriki,(2004), dijelaskan bahwa pada dasarnya konsep kutub pertumbuhan mempunyai ikatan dengan ruang ekonomi secara abstrak dan tidak adanya keterikatan dengan ruang geografi. Tiga ruang abstrak itu , terdiri dari : (1 ruang yang ditentukan oleh rencana (2) ruang sebagai media kekuatan – kekuatan, dan (3) ruang sebagai keadaan yang homogen.

F. Standar Pelayanan Minimum Prasarana lingkungan Permukiman

1) Jaringan Jalan

Tabel 1.
Standar Pelayanan Minimal Jaringan Jalan

No.	Bidang Pelayanan	Standar Pelayanan	
		Cakupan	Tingkat Pelayanan
1.	Jalan	Panjang 40-60 m/Ha dengan Lebar 2-5 m	Kecepatan rata-rata 15 s.d 20 km/jam

Sumber : Bidang Penataan Ruang Dan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2014.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa standar pelayanan pada jalan dengan panjang 40-60 m/Ha dan lebar 2-5 m dengan kecepatan rata-rata 15 s.d 20 km/jam .

2) Jaringan Air Bersih

Tabel 2.
Standar Pelayanan Minimal Jaringan Air Bersih

No.	Bidang Pelayanan	Standar Pelayanan	
		Cakupan	Tingkat Pelayanan
1.	Rumah Tangga	Setiap 1 jiwa membutuhkan 60 liter/hari	Tersedia layanan pipa PDAM
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Posyandu membutuhkan 300 liter/unit/hari • Tempat Praktek membutuhkan 1250 liter/unit /hari 	
3.	Perkantoran	1 unit kantor membutuhkan 1000 liter/hari	
4.	Pendidikan	Membutuhkan 10 liter/orang/hari	
5.	Peribadatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mesjid membutuhkan 3500 liter/unit/hari • Musholla membutuhkan 2000 liter/unit/hari 	

Sumber : Bidang Penataan Ruang Dan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa satandar pelayanan minimal (SPM) jaringan air bersih untuk Rumah Tangga Setiap 1 jiwa membutuhkan 60 liter/hari dengan 1 jiwa terlayani 60 liter/hari, kesehatan seperti posyandu membutuhkan 300 liter/unit/hari tempat praktek membutuhkan 1250 liter/unit/hari dengan posyandu terlayani 300 liter/unit/hari tempat praktek terlayani 1250 liter/unit/hari, perkantoran dengan 1 unit kantor membutuhkan 1000 liter/hari dimana 1 unit kantor terlayani 1000 liter/hari, pendidikan membutuhkan 10 liter/orang/hari

terlayani 10 liter/orang/hari, peribadatan seperti mesjid membutuhkan 3500 liter/unit/hari musholla membutuhkan 2000 liter/unit/hari, dengan mesjid terlayani 3500 liter/unit/hari musholla terlayani 2000 liter/unit/hari.

3) Jaringan Listrik

Tabel 3.
Kebutuhan Jaringan Listrik

No.	Jenis Sambungan	Jumlah Pelanggan (Unit)	Daya (KVA)	Jumlah (KVA/Watt)
1	Rumah Type A	199	1,300	258,414
2	Rumah Type B	596	900	536,706
3	Rumah Type C	1,193	450	536,706
4	Pendidikan	4	1,500	6,000
5	Peribadatan	20	1,500	30,000
6	Kesehatan	8	1,500	12,000
7	Pelayanan Umum	4	1,500	6,000
8	Perdagangan	4	1,500	6,000
9	Olah Raga	3	1,500	4,500
10	Penerangan Lampu Jalan = 10 % dari total kebutuhan	—	—	139,633
J u m l a h		2,031		1,535,959

Sumber : Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Tahun 2014

Tabel 4.
Kebutuhan Listrik Untuk Perumahan

Jenis rumah	Ukuran Petak rata-rata (m²)	Luas bangunan rata-rata (m²)	Kebutuhan (watt)	Jumlah rumah yang dilayani gardu (unit)
Kecil	100	70	900	1400
Sedang	200	240	900	420
Besar	400	600	1300	100

Sumber : Standar Nasional Indonesia Tahun 2014

Keseluruhan kebutuhan energi listrik di kawasan perencanaan berdasarkan standar perencanaan lingkungan perkotaan kebutuhan listrik adalah pada tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5.
Standar Pelayanan Minimal Jaringan Listrik

No.	Bidang Pelayanan	Standar Pelayanan Kualitas	
		Cakupan	Tingkat Pelayanan
1.	Permukiman	Type besar membutuhkan energi listrik sebesar 1.300 watt/unit Type kecil dan sedang membutuhkan energi listrik sebesar 900 watt/unit	Energi listrik sebesar 900 watt/unit
2.	Bangunan Sosial	Membutuhkan 50% dari kebutuhan permukiman	50% dari kebutuhan permukiman
3.	Bangunan Ekonomi	Membutuhkan 25% dari kebutuhan permukiman	25% dari kebutuhan permukiman
4.	Penerangan Jalan	Membutuhkan 10 % dari kebutuhan permukiman	10 % dari kebutuhan permukiman
5.	Kehilangan energi	Diperkirakan 30 % dari total energi listrik yang dibutuhkan	

Sumber : Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa standar pelayanan minimum (SPM) jaringan listrik untuk permukiman membutuhkan energi listrik sebesar 900 watt/unit dengan energi listrik sebesar 900 watt/unit, bangunan sosial membutuhkan 60% dari kebutuhan permukiman, Bangunan ekonomi membutuhkan 25% dari kebutuhan permukiman, penerangan jalan membutuhkan 10 % dari kebutuhan permukiman.

4) Jaringan Drainase

Tabel 6.
Standar Pelayanan Minimal Jaringan Drainase

No.	Bidang Pelayanan	Standar Pelayanan Kualitas	
		Cakupan	Tingkat Pelayanan
1.	Jaringan Drainase	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran primer/makro drainase untuk kawasan strategis seperti perdagangan, industri, permukiman, untuk penanganan >10 ha, • Saluran sekunder untuk penanganan genangan >10 Ha • Saluran Tersier, untuk penanganan genangan <10 Ha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terjadi lagi genangan banjir bila terjadi genangan; tinggi genangan rata rata < 30 cm, lama genangan < 2jam. Frekwensi kejadian banjir < 2 kali setahun

Sumber : Bidang Penataan Ruang Dan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2014.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa standar pelayanan minimum (SPM) untuk mengetahui ketersediaan jaringan drainase maka dilakukan penjumlahan antara jaringan jalan yang ada dengan jaringan.

5) Jaringan Persampahan

Tabel 7.
Standar Pelayanan Minimal Jaringan Persampahan

No.	Bidang Pelayanan	Standar Pelayanan Kualitas	
		Cakupan	Tingkat Pelayanan
1.	Rumah Tangga	timbulan sampah perorang yaitu 2,9 liter/hari atau 11,6 liter/KK,	• 1 unit bak sampah melayani 40liter/150KK • 1 unit gerobak sampah melayani 1000liter/200 KK
2.	Pendidikan	timbulan sampah yaitu 1,15 liter/hari/siswa	• 1 unit kontainer melayani 8000liter/1000KK
3.	Perdagangan	30% dari jumlah timbulan sampah rumah tangga	
4.	Perkantoran	10% dari jumlah timbulan sampah rumah tangga	

Sumber : Bidang Penataan Ruang Dan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2014.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa standar pelayanan minimum (SPM) jaringan persampahan untuk rumah tangga timbulan sampah perorang yaitu 2,9 liter/hari atau 11,6 liter/KK, 1 unit tong sampah melayani 40liter/150KK 1 unit gerobak sampah melayani 1000 liter/200.

Kuantitas sampah yang dihasilkan akan dikumpulkan ataupun dikelola dengan menggunakan sarana dan prasarana, berupa penyediaan;

- Gerobak 1 M² untuk 200 KK.
- Tempat pembuangan sementara (TPS) untuk 150 KK.
- Kontainer sampah dengan volume 6 – 8 M² 1000 KK.

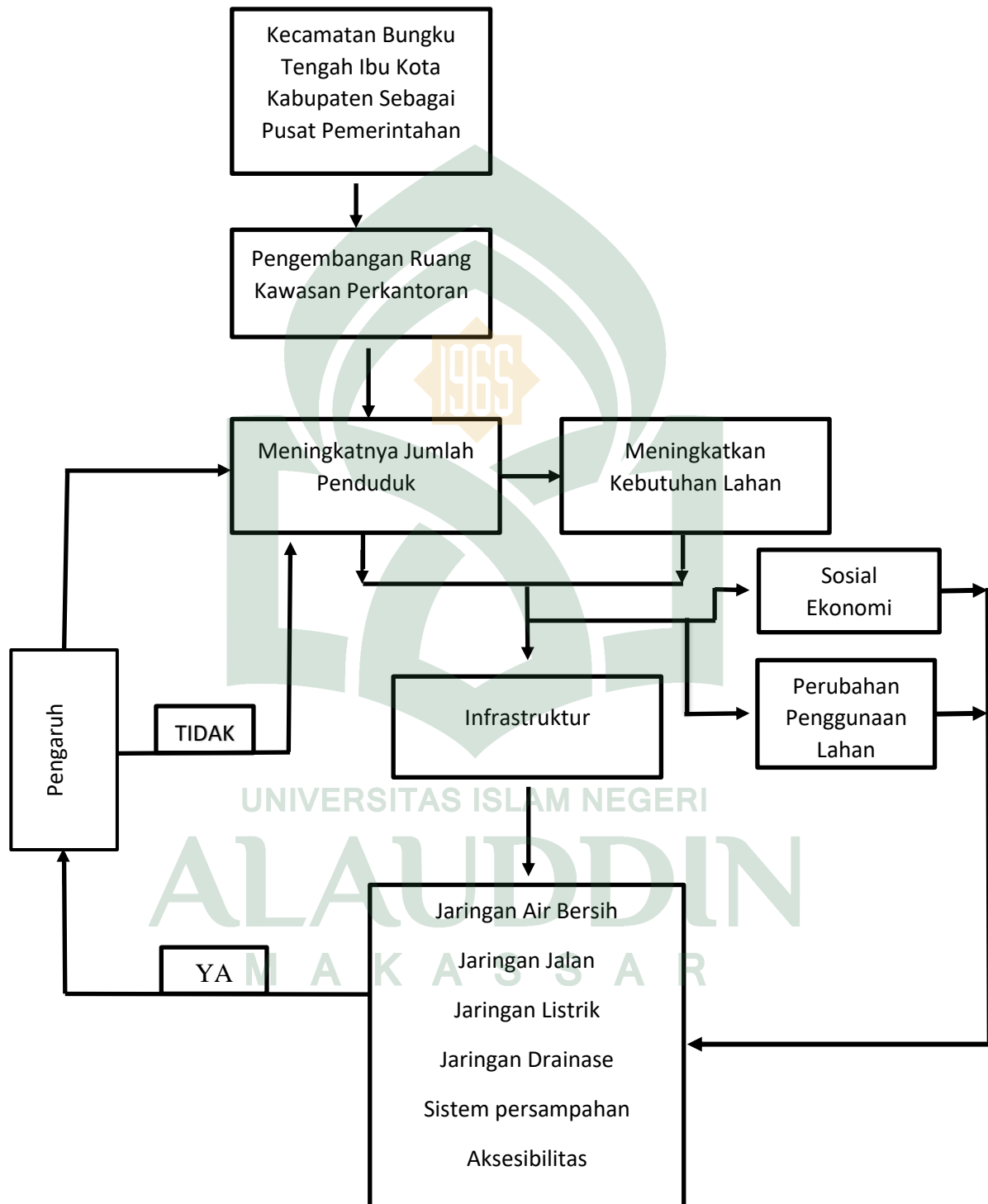
6) Aksesibilitas

Faktor yang menentukan suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain disekitarnya. tingkat aksesibilitas antara lain dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana perhubungan termasuk frekwensi dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut. Waktu tempuh sering lebih memberikan gambaran yang sebenarnya karena didalamnya selain unsur jarak juga termasuk kondisi prasarana dan sarana yang tersedia, termasuk frekwensi keberangkatan. Dengan demikian maka waktu tempuh lebih mampu menggambarkan tingkat aksesibilitas (Tarigan, 2005). Variabel aksesibilitas yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan tingkat aksesibilitas, yaitu

1. Kondisi jalan yang terdiri dari :

- a. aspal (Baik)
- b. Pengerasan (Sedang)
- c. Tanah (buruk)

G. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian kualitatif-kuantitatif atau dikenal dengan metode *mixed methods*. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif (Sugiyono, 2011 : 404).

Jenis penelitian ini berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yaitu sifatnya *kualitatif dan kuantitatif* atau penelitian terapan yang di dalamnya mencakup penelitian survey, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan/fakta serta fenomena pengaruh pengembangan ruang kawasan perkantoran terhadap pembangunan infrastruktur Lingkungan Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali yang terjadi saat ini dan kemungkinan terjadinya dimasa yang akan datang dengan pendekatan kuantitatif yaitu melalui perhitungan tabulatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian non matematis dengan proses menghasilkan data-data dari hasil temuan berupa pengamatan, survey maupun wawancara. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian dengan menggunakan data-data tabulasi, data

angka sebagai bahan pembanding maupun bahan rujukan dalam menganalisis secara deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan Perkantoran bumi fonuansingko Desa Bente , Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Pemilihan lokasi penelitian ini atas pertimbangan kondisi nyata dari lokasi penelitian ini atas pertimbangan kondisi nyata dari lokasi penelitian sebagai berikut ini : Desa Bente merupakan lokasi Kawasan Perkantoran yang ada yang merupakan lokasi penelitian untuk mengetahui pengaruh pengembangan kawasan perkantoran terhadap pembangunan infrastruktur yang ada.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut jenisnya data terbagi data kualitatif dan data kuantitatif yaitu :

- a. Data kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Meliputi data kondisi sarana dan prasarana, batas dan ruang lingkup kota, penggunaan lahan, jaringan jalan , dan lain-lain.
- b. Data kuantitatif; data yang berwujud angka- angka berupa data mengenai data kependudukan (jumlah penduduk, pertambahan dan perkembangan penduduk) dan hidrologi (air permukaan dan air tanah) jumlah sarana dan prasarana, luas wilayah penelitian .

2. Sumber Data

Data- data yang digunakan untuk melakukan penelitian :

a. Data Primer

Data primer tersebut dapat diperoleh dengan cara :

- 1) Survey lapangan, dan wawancara langsung dengan masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang Pengaruh pengembangan Ruang Kawasan Perkantoran Terhadap Pembangunan infrastruktur Lingkungan.
- 2) Melakukan sketsa atau gambar untuk mengetahui letak kawasan perkantoran

Data primer yang dibutuhkan antara lain :

- 1) Data luas wilayah dan luas kawasan perkantoran
- 2) Data penggunaan lahan/eksisting
- 3) Kondisi infrastruktur

b. Data Sekunder

Data sekunder tersebut dapat diperoleh melalui instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti kantor desa, kantor Kecamatan, dan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS), dan beberapa instansi terkait lainnya.

Adapun data yang dimaksud adalah :

- 1) Data kondisi fisik yang mencakup letak geografis, kondisi topografis, kondisi hidrologi, jenis tanah.
- 2) Data sosial mencakup kependudukan.
- 3) Peta – peta yang terkait penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, maka dilakukan dengan cara:

1. Observasi lapangan yaitu suatu teknik penyaringan data melalui pengamatan langsung di lapangan secara sistematis mengenai fenomena yang diteliti.
2. Interview dengan masyarakat setempat yang dianggap layak memberikan data atau informasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Telah pustaka yaitu cara pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca atau mengambil literatur laporan, jurnal, bahan seminar, bahan perkuliahan, dan sumber-sumber bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
4. Studi Dokumentasi, untuk melengkapi data maka kita memerlukan informasi dari dokumentasi yang ada hubungannya dengan obyek yang menjadi studi. Caranya yaitu dengan cara mengambil gambar, dan dokumentasi foto.

E. Variabel Penelitian

Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif (Sudjana, 1981). Variabel dipakai dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian yang digunakan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jaringan Jalan
2. Jaringan Air Bersih
3. Jaringan Listrik
4. Jaringan Drainase
5. Sistem persampahan
6. Aksesibilitas



F. Metode Analisis Data

1. Analisis Kuantitatif

Dalam penelitian ini salah satu teknik yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Untuk menjelaskan tingkat ketersediaan infrastruktur yang ada pada kawasan penelitian maka, pendekatan yang dilakukan adalah membandingkan ketersediaan prasarana dengan standar pelayanan minimum dan untuk mendapatkan penilaian dengan memberi bobot pada masing-masing indikator prasarana.

Adapun kriteria metode untuk standar skoring yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Skor 5 untuk Sangat Tinggi.
- Skor 3 untuk Sedang.
- Skor 1 untuk Rendah.

Adapun kriteria untuk penentuan nilai skoring masing-masing dari pernyataan responden digunakan pedoman sebagai berikut :

a. Indikator Jalan

Sasaran pembobotan ketersediaan, kondisi, dan pemanfaatan jalan adalah berdasarkan norma pedoman prosedur manual tentang Jalan.

1) Panjang dan lebar jalan primer sesuai dengan klasifikasinya, diukur dengan kategori :

- a) Skor 5 apabila 70% - 100% sesuai dengan standar panjang jalan

b) Skor 3 apabila 40% – 69,99% sesuai dengan standar panjang jalan

c) Skor 1 apabila 0% - 39,99% tidak sesuai dengan standar panjang jalan

2) Panjang dan lebar jalan Lingkungan sesuai dengan klasifikasinya, diukur dengan kategori :

a) Skor 5 apabila 70% - 100% sesuai dengan standar panjang jalan

b) Skor 3 apabila 40% – 69,99% sesuai dengan standar panjang jalan

c) Skor 1 apabila 0% - 39,99% tidak sesuai dengan standar panjang jalan

b. Indikator Ketersediaan Air Bersih

Pembobotan kondisi air bersih dilakukan berdasarkan kondisi jumlah rumah penduduk di kawasan permukiman yang sudah memperoleh aliran air dari sistem penyediaan air bersih berdasarkan norma standar pelayanan minimum tentang air bersih.

1) Layanan pipa Pdam per unit rumah

a) Skor 5 jika 70% - 100% KK terlayani pipa Pdam dari total KK di Desa Bente.

b) Skor 3 jika terlayani pipa Pdam di kisaran 40% – 69,99%.

c) Skor 1 jika 0% - 39,99% terlayani pipa Pdam dari total Kk di Desa Bente.

c. Indikator Ketersediaan Listrik

Pembobotan ketersediaan listrik dilakukan berdasarkan jumlah kebutuhan jaringan listrik berdasarkan norma standar prosedur manual tentang listrik.

1) Jumlah kebutuhan jaringan listrik kawasan permukiman

a) Skor 5 jika energi daya listrik rumah type kecil 900 watt dan rumah type besar

1300 kisaran 70% - 100% Skor 3 jika terlayani listrik di kisaran 40% – 69,99%.

- b) Skor 3 jika energi daya listrik rumah type kecil 900 watt dan rumah type besar 1300 kisaran 0% - 39,99%
 - c) Skor 1 jika energi daya listrik rumah type kecil 900 watt dan rumah type besar 1300 kisaran 0% - 39,99%
- 2) Jumlah kebutuhan jaringan listrik kawasan perkantoran
- a) Skor 5 jika energi daya listrik 1500 watt dikisaran 70% - 100%
 - b) Skor 3 jika energi daya listrik 1500 di kisaran 40% – 69,99%.
 - c) Skor 1 jika energi daya listrik 1500 watt dikisaran 0% - 39,99%
- 3) Jumlah kebutuhan jaringan listrik kawasan perdagangan
- a) Skor 5 jika energi daya listrik 1500 watt dikisaran 70% - 100%
 - b) Skor 3 jika energi daya listrik 1500 di kisaran 40% – 69,99%.
 - c) Skor 1 jika energi daya listrik 1500 watt dikisaran 0% - 39,99%
- 4) Jumlah kebutuhan jaringan listrik kawasan pendidikan
- a) Skor 5 jika energi daya listrik 1500 watt dikisaran 70% - 100%
 - b) Skor 3 jika energi daya listrik 1500 di kisaran 40% – 69,99%.
 - c) Skor 1 jika energi daya listrik 1500 watt dikisaran 0% - 39,99%
- 5) Jumlah kebutuhan jaringan listrik kawasan peribadatan
- a) Skor 5 jika energi daya listrik 1500 watt dikisaran 70% - 100%
 - b) Skor 3 jika energi daya listrik 1500 di kisaran 40% – 69,99%.
 - c) Skor 1 jika energi daya listrik 1500 watt dikisaran 0% - 39,99%

6) Jumlah kebutuhan jaringan listrik kawasan penerangan jalan

- a) Skor 5 jika energi daya listrik 10% dari kebutuhan permukiman dikisaran 70% - 100%
- b) Skor 3 jika energi daya listrik 10% dari kebutuhan permukiman di kisaran 40% – 69,99%.
- c) Skor 1 jika energi daya listrik 10% dari kebutuhan permukiman dikisaran 0% - 39,99%

d. Indikator Jaringan Drainase

Metode pembobotan prasarana persampahan berdasarkan norma standar prosedur manual tentang persampahan adalah sebagai berikut :

1) Ketersediaan jaringan drainase diukur dengan kategori :

- a) Skor 5 ,jika ketersediaan jaringan drainase dikisaran 70 % - 100 % .
- b) Skor 3, jika ketersediaan jaringan drainase dikisaran 40 % - 69 %
- c) Skor 1 , jika ketersediaan jaringan drainase dikisaran 0 % - 39,99%

e. Indikator Sistem persampahan

Metode pembobotan sistem persampahan berdasarkan norma standar prosedur manual tentang persampahan adalah sebagai berikut :

1) Jumlah TPS persampahan kawasan permukiman

- a) Skor 5 jika jumlah volume sampah kawasan permukiman dikisaran 70% - 100%
- b) Skor 3 jika jumlah volume sampah kawasan permukiman dikisaran 40 % – 69,99%.
- c) Skor 1 jika jumlah volume sampah kawasan permukiman dikisaran 0% - 39,99%.

2) Jumlah gerobak sampah pada permukiman

- a) Skor 5 jika jumlah gerobak sampah kawasan permukiman dikisaran 70% - 100%
- b) Skor 3 jika jumlah gerobak sampah kawasan permukiman dikisaran 40 % – 69,99%.
- c) Skor 1 jika jumlah gerobak sampah kawasan permukiman dikisaran 0% - 39,99%.

3) Jumlah kontainer persampahan kawasan permukiman

- a) Skor 5 jika jumlah kontainer sampah kawasan permukiman dikisaran 70% - 100%.
- b) Skor 3 jika jumlah kontainer sampah kawasan permukiman dikisaran 40 % – 69,99%.
- c) Skor 1 jika jumlah kontainer sampah kawasan permukiman dikisaran 0% - 39,99%.

f. Aksesibilitas

1) Kondisi jalan

- a) Skor 5 apabila perbandingan kondisi jalan dikisaran 70%- 100%.
- b) Skor 3 apabila perbandingan kondisi jalan dikisaran 40- 69 %.
- c) Skor 1 apabila perbandingan kondisi jalan dikisaran 0 % - 39,99%.

Selanjutnya untuk menentukan nilai dari setiap komponen dilakukan klasifikasi jenis penilaian dengan menggunakan Skala Likert I/3 yaitu :

Tabel 8.
Penentuan Kategorisasi dengan Skala Likert

No.	Skala Likert	Interval	Persentase (%)	Nilai Bobot
1.	Sangat tinggi	6,7 – 10	66,7 – 100	5
2.	Sedang	3,4 – 6,6	33,4 – 66,6	3
3.	Rendah	0 – 3,3	0 - 33,33	1

2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan pengaruh pengembangan ruang kawasan perkantoran terhadap perkembangan infrastruktur lingkungan pada kawasan penelitian di Desa Bente. data didapatkan dari hasil tingkat ketersediaan infrastruktur, serta hasil wawancara secara langsung dan mendalam, proses tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kebutuhan dan keinginan masyarakat dan stakeholder yang lain dalam rangka merespon penataan dan pengembangan kawasan penelitian. Dalam menunjang analisis deskriptif-kualitatif ini terdapat beberapa bagian analisis deskriptif yang akan memberikan penjelasan yang konkrit dalam menganalisa rumusan masalah yaitu dari (Agung, 2004) :

- 1) Deskriptif mengenai hasil analisis olah data infrastruktur pada kawasan penelitian.
- 2) Mendeskriptifkan pengaruh berdasarkan hasil analisis ketersediaan infrastruktur kawasan penelitian, kemudian memberikan arahan pengembangan untuk masing-masing infrastruktur agar mampu menunjang aktifitas dan fungsi ruang dikawasan penelitian.

G. Defensisi Operasional

Dalam definisi operasional ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian untuk dijadikan acuan, definisi tersebut adalah:

1. Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh pengembangan ruang kawasan perkantoran terhadap pembangunan infrastruktur Lingkungan
2. Pengembangan Ruang yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah pembangunan kawasan perkantoran yang mengalami pengembangan wilayah kawasan.
3. Kawasan Perkantoran yang di maksud dalam penelitian ini adalah kawasan pusat kegiatan pemerintahan yang berada di ruang lingkup penelitian
4. Pusat Pemerintahan merupakan tempat untuk melaksanakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pemerintahan, baik itu kegiatan politik dan administratif.
5. Infrastruktur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dapat meliputi prasarana penyediaan air minum kota, pengelolaan air limbah, sistem persampahan, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana.
6. Jaringan air bersih merupakan prasarana permukiman yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan minum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Morowali

1. Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Morowali terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 12 oktober 1999. Secara geografis wilayah Kabupaten Morowali berada pada titik koordinat yaitu $121^{\circ}2'24''$ – $123^{\circ}15'36''$ dan lintang selatan: $01^{\circ}31'12''$ – $03^{\circ}46'48''$ serta berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-Una
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Perairan Teluk Tolo dan Kabupaten Banggai
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara

Pada tahun 2004 kabupaten Morowali mengalami pemekaran sehingga Kecamatan yang semula berjumlah 10 menjadi 13 Kecamatan. Pada tahun 2009 menjadi 14 Kecamatan. Kemudian pada tahun 2011 bertambah lagi 4 kecamatan pemekaran. Sehingga pada akhir tahun 2011, Kabupaten Morowali terdiri dari 18 Daerah kabupaten, Kecamatan Bungku utara dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Bungku Utara dan Mamosalato. Sedangkan Bungku barat dimekarkan menjadi 3 Kecamatan yaitu Bungku Barat Bumi, Raya dan Wita ponda, Kecamatan Mori Atas menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Mori Utara dan

Kecamatan Mori Atas, Kemudian pada tahun 2011 Lembo dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Lembo dan Lembo Raya, Petasia dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Petasia dan Petasia Timur, Bungku Tengah dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Bungku Tengah dan Bungku Timur dan Kecamatan Bungku Selatan dimekarkan menjadi 2 yaitu Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir.

Bagian paling utara terdapat wilayah Kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara, di bagian paling selatan terdapat wilayah Kecamatan Menui Kepulauan yang terdiri beberapa pulau besar dan kecil. Sedangkan dibagian timur adalah perairan Teluk Tolo serta bagian paling Barat terdapat wilayah Kecamatan Mori Atas.

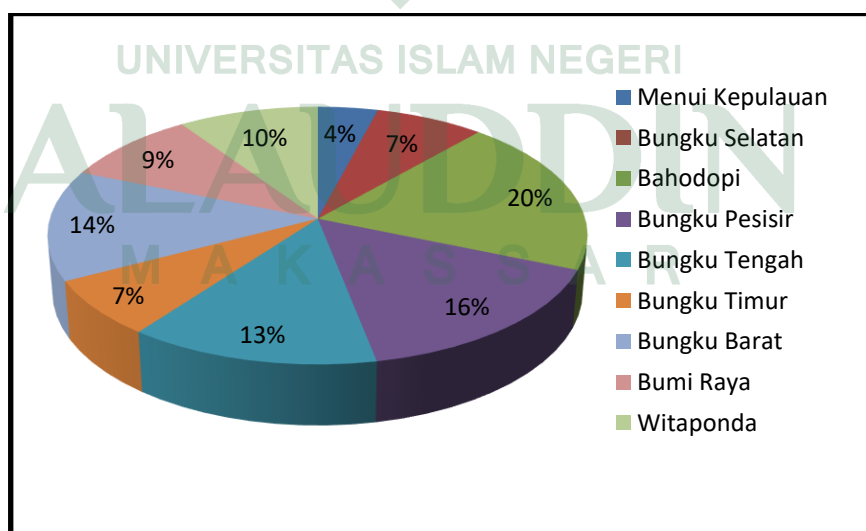
Pada tahun 2013, wilayah Kabupaten Morowali mengalami pemekaran lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Morowali (Kabupaten Induk) dan Kabupaten Morowali Utara, sehingga untuk wilayah Kabupaten Morowali Terdiri atas 9 (sembilan) Kecamatan, 7 Kelurahan dan 126 desa (sumber BPS : Kabupaten Morowali dalam angka Tahun 2015).

Luas Kabupaten Morowali 15.49012 Km² atau sekitar 22,77% dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah. Terdapat 9 Kecamatan di Kabupaten Morowali yaitu :

Tabel 9.
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi
Di Kabupaten Morowali

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Presentase (%)
1	Menui Kepulauan	223,63	4,07
2	Bungku Selatan	403,90	7,38
3	Bahodopi	1.080,98	19,76
4	Bungku Pesisir	867,29	15,58
5	Bungku Tengah	725,57	13,26
6	Bungku Timur	387,23	7,08
7	Bungku Barat	758,93	13,87
8	Bumi Raya	504,77	9,23
9	Witaponda	519,70	9,50
Jumlah		5.472,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Morowali Dalam Angka 2015



Gambar 1. Grafik Pembagian Daerah Administrasi Kab.Morowali

Berdasarkan tabel 10 dan grafik 1 dapat diketahui bahwa Kecamatan Bungku Tengah merupakan Kecamatan yang presentase luas wilayahnya tertinggi ketiga dengan presentase 13,26 % atau sama dengan 725,57 Km² , sedangkan luas wilayah yang presentasenya lebih kecil yaitu Kecamatan Menui Kepulauan yaitu sebesar 4,07 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta administrasi Kabupaten Morowali pada halaman 59.

2. Kondisi Fisik Dasar

a. Topografi

Akibat bentuk lahan yang bervariasi maka wilayah Kabupaten Morowali memiliki topografi yang bervariasi. Dilihat dari elevasi, wilayah Kabupaten Morowali sebagian besar (52,74 %) berada pada ketinggian antara 100-200 meter diatas permukaan laut (dpl), berikut seluas 33,74% berada pada ketinggian antara 200-500 meter dpl, dan selebihnya seluas 13.52% berada pada ketinggian dibawah 100 meter dpl. Elevasi tersebut juga menggambarkan tingkat kelerengannya wilayah ini sebagian besar (52,30%) memiliki kemiringan topografi lebih besar dari 40% (curam-sangat curam), sedangkan selebihnya 11,70% luas wilayah memiliki kemiringan dibawah 2% (datar agak landai), 12,56% luas wilayah memiliki kemiringan antara 3%-15% dan 23,30% luas wilayah memiliki kemiringan antara 16%-40% (miring agak luas) dan danau seluas 0,14%.

b. Hidrologi

Ada 2 (dua) kategori hidrologi yang melingkupi wilayah Kabupaten Morowali, yaitu : 1) jenis air permukaan; 2) Jenis air tanah dangkal dan air

tanah dalam. Kedua jenis air tersebut berasal dari air hujan dan sebagian mengalir ke permukaan (run-off) dan sebagian lagi meresap ke dalam tanah. Jenis air permukaan, beberapa diantaranya adalah sungai-sungai yang ada dan melintas wilayah kabupaten morowali.

Berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor : 11A/PRT/M/2006 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai, bahwa wilayah sungai yang ada di Kabupaten Morowali termaksud dalam wilayah sungai strategis nasional. Adapun wilayah sungai tersebut adalah wilayah sungai Laa-Tambalako, yang meliputi daerah sungai laa, DAS Tirongan, DAS Salato, DAS Morowali, DAS Sumare, DAS Bahombelu an DAS Bahodopi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.
Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Wilayah
Kabupaten Morowali

NO	Nama DAS	Luas (Ha)
1	DAS Laa	2.875,60
2	DAS Tambalako	1.045,60
3	DAS Tirongan	-
4	DAS Salato	623,12
5	DAS Morowali	372,50
6	DAS Sumare	237,50
7	DAS Bamonbelu	-
8	DAS Bahodopi	246,87

Sumber : Profil Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng, 2013

c. Klimatologi

Sebagaimana daerah tropis lainnya, Kabupaten Morowali memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni-Oktober, dan musim penghujan Desember – Mei curah hujan bervariasi dari yang terendah 2.273 mm tercatat di stasiun Beteleme dan tertinggi 3.435 mm di Kolonodale. Bulan terbasah terjadi pada bulan april (336 mm) dan bulan terkering (91 mm) terjadi pada bulan September berdasarkan klasifikasi schmidt-fergusson, wilayah Kabupaten Morowali tergolong iklim A atau sangat basah dengan suhu antara rata-rata bulanan berkisar antara 26,5oC sampai 27,4oC.

Kabupaten Morowali memiliki iklim yang sangat basah, karena itu wajar jika daerah ini memiliki jumlah sungai yang cukup banyak sebagai sumberdaya air yang potensial untuk dimanfaatkan untuk pengairan namun demikian perlu diwaspadai dengan curah hujan tinggi yang berpotensi menimbulkan bahaya banjir dan tanah longsor. Sungai utama di Kabupaten Morowali adalah Sungai Laa dengan panjang 96,30 Km dan Sungai Tambalako dengan panjang 83,7 Km.


































d. Geologi

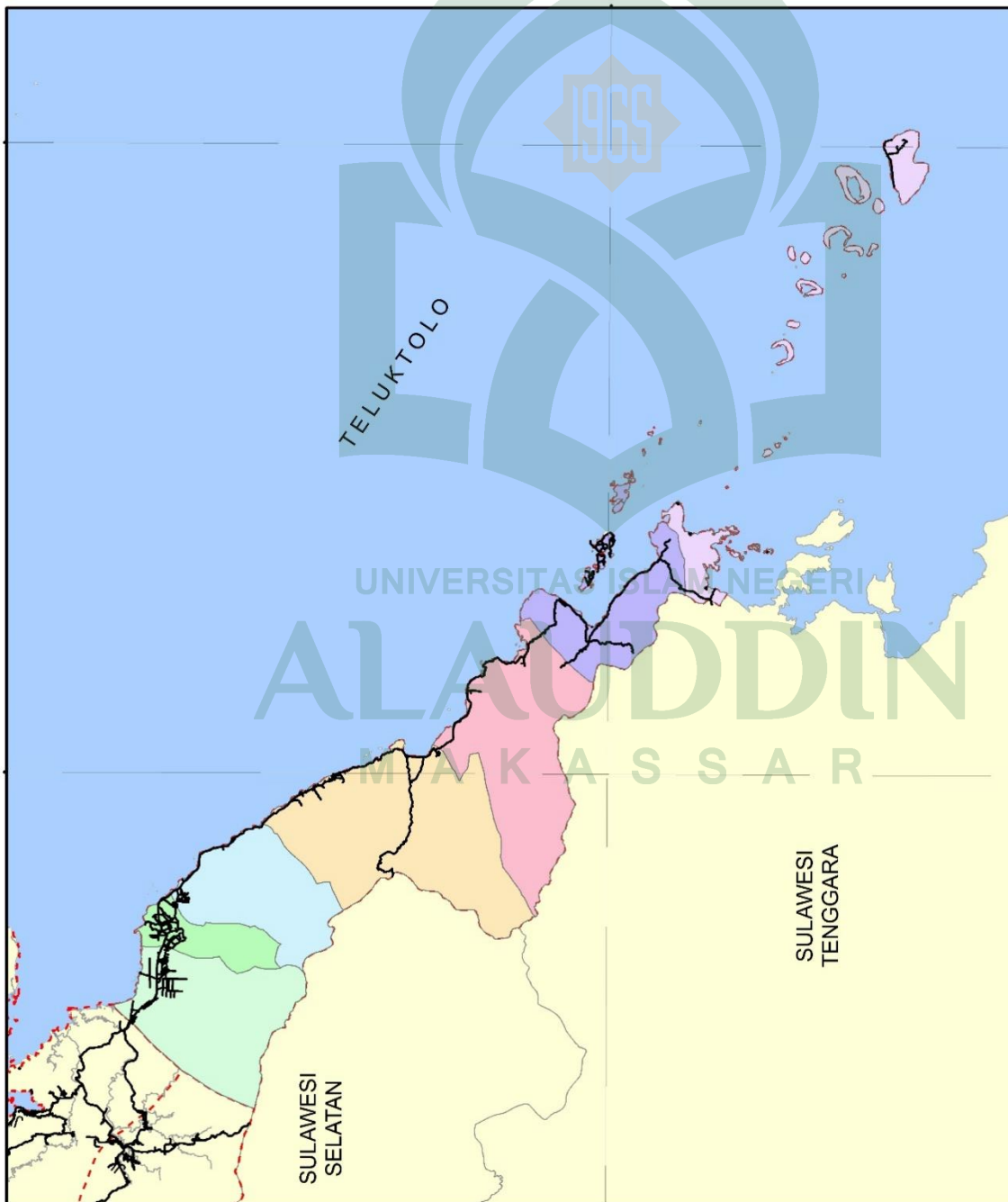
Secara geologi, wilayah Kabupaten Morowali tersusun atas beberapa jenis batuan yang antara lain adalah batuan mollase, batuan Kapur, batuan skiss, batuan basik, ultra basik dan sedimen sedangkan dari sisi geomorfologi wilayah ini tersusun atas beberapa bentuk lahan (landform), yaitu bentuk lahan aluvial (A), marine (M), vulkanik (V), tektonik dan struktural (T). Bentuk

lahan aluvial yang terbentuk dari proses fluvial umumnya tersebar di dataran rendah dengan kemiringan antara 0 - 3% yang banyak dijumpai di sekitar sungai-sungai besar. Bentuk lahan marine tersebar pada wilayah datar agak cekung di sepanjang pantai. Bentuk lahan tektonik dan vulkanik tersebar pada relief yang bergelombang sampai bergunung.

Akibat curah hujan yang tinggi, struktur geologi yang dipengaruhi oleh dua sesar utama serta topografi dengan dominasi kemiringan curam maka wilayah ini memiliki pula kawasan-kawasan yang rawan bencana, khususnya bencana banjir, longsor maupun rawan gempa.

Tanah di wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan klasifikasi soil taxonomi, terdiri dari beberapa ordo tanah, yaitu alfisols, entisols, ultisols, inceptisols, histosols, endisols, oxisols, vertisols, dan mellisols, dengan kedalaman efektif tanah sebagian besar cukup dalam. Tanah dengan kedalaman 0- 30 cm hanya 3,03% dan 31 -60 cm seluas 18,02% selebihnya seluas 45,44% memiliki kedalaman 60- 90 cm dan kedalaman diatas 90 cm seluas 35,94%. Sebagian besar tanah di wilayah ini tergolong subur dengan diindikasikan seluas 45,44% tanahnya bertekstur sedang 43,87% bertekstur halus dan hanya 10,55% yang bertekstur kasar.

 <p>Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016</p>		<p>Judul Skripsi Pengaruh Pengembangan Ruang Kawasan Perkantoran Terhadap Pembangunan Infrastruktur Lingkungan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali</p>		<p>No. Peta 001</p>		<p>Judul Gambar : PETA ADMINISTRASI</p>		<p>Skala : 1:1.300.000</p> 		<p>Legenda :</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Batas Administrasi</td> <td></td> <td>BUNGKU SELATAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jalan</td> <td></td> <td>BUNGKU TENGAH</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sungai</td> <td></td> <td>MENUI KEPULAUAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BAHODOPI</td> <td></td> <td>WITAPONDA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BUMI RAYA</td> <td></td> <td>BUNGKU BARAT</td> </tr> </table>			Batas Administrasi		BUNGKU SELATAN		Jalan		BUNGKU TENGAH		sungai		MENUI KEPULAUAN		BAHODOPI		WITAPONDA		BUMI RAYA		BUNGKU BARAT	<p>Insert :</p>  <p>Lokasi Penelitian</p>		<p>Dosen Pembimbing :</p> <p>1. Ir.H. Syamsuddin DM, M.Si 2. Nursyam Aksa, ST., M.Si</p>		<p>Mahasiswa :</p> <p>MUH.FARID AW HASAN (6080011085)</p>		<p>Sumber Peta :</p> <p>Foto Udara Tahun 2015 Peta Rupa Bumi Tahun 2012</p>	
	Batas Administrasi		BUNGKU SELATAN																																				
	Jalan		BUNGKU TENGAH																																				
	sungai		MENUI KEPULAUAN																																				
	BAHODOPI		WITAPONDA																																				
	BUMI RAYA		BUNGKU BARAT																																				



KABUPATEN MOROWALI

B. Gambaran Umum Kecamatan Bungku Tengah

1. Letak Geografis dan Administrasi

Kecamatan Bungku Tengah merupakan ibu kota Kabupaten Morowali. Secara geografis wilayah Kecamatan Bungku Tengah berada pada titik koordinat yaitu ($121^{\circ}2'24''$ – $123^{\circ}15'36''$) dan Lintang Selatan: ($01^{\circ}31'12''$ – $03^{\circ}46'48''$) serta berbatasan dengan :

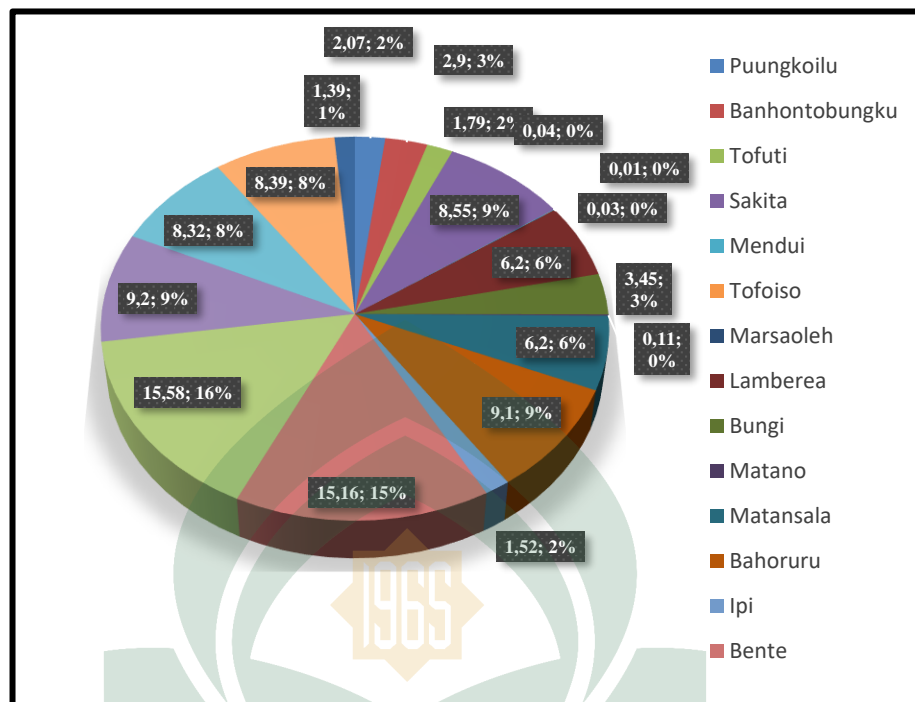
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bungku Barat dan Perairan Teluk Tolo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bungku Timur
- c. Sebelah Timur berbatasan Perairan Teluk Tolo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan

Kecamatan Bungku Tengah terdiri dari 19 Desa dengan luas wilayah $725,57 \text{ Km}^2$ tersebut tercatat, tampak bahwa Desa Bahomohoni memiliki luas wilayah terluas yaitu $113,00 \text{ Km}^2$, terluas kedua adalah Desa Bente dengan luas $110,00 \text{ Km}^2$, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan Tofoiso yaitu $0,10 \text{ Km}^2$. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 11 dan peta administrasi Kecamatan Bungku Tengah pada halaman 63.

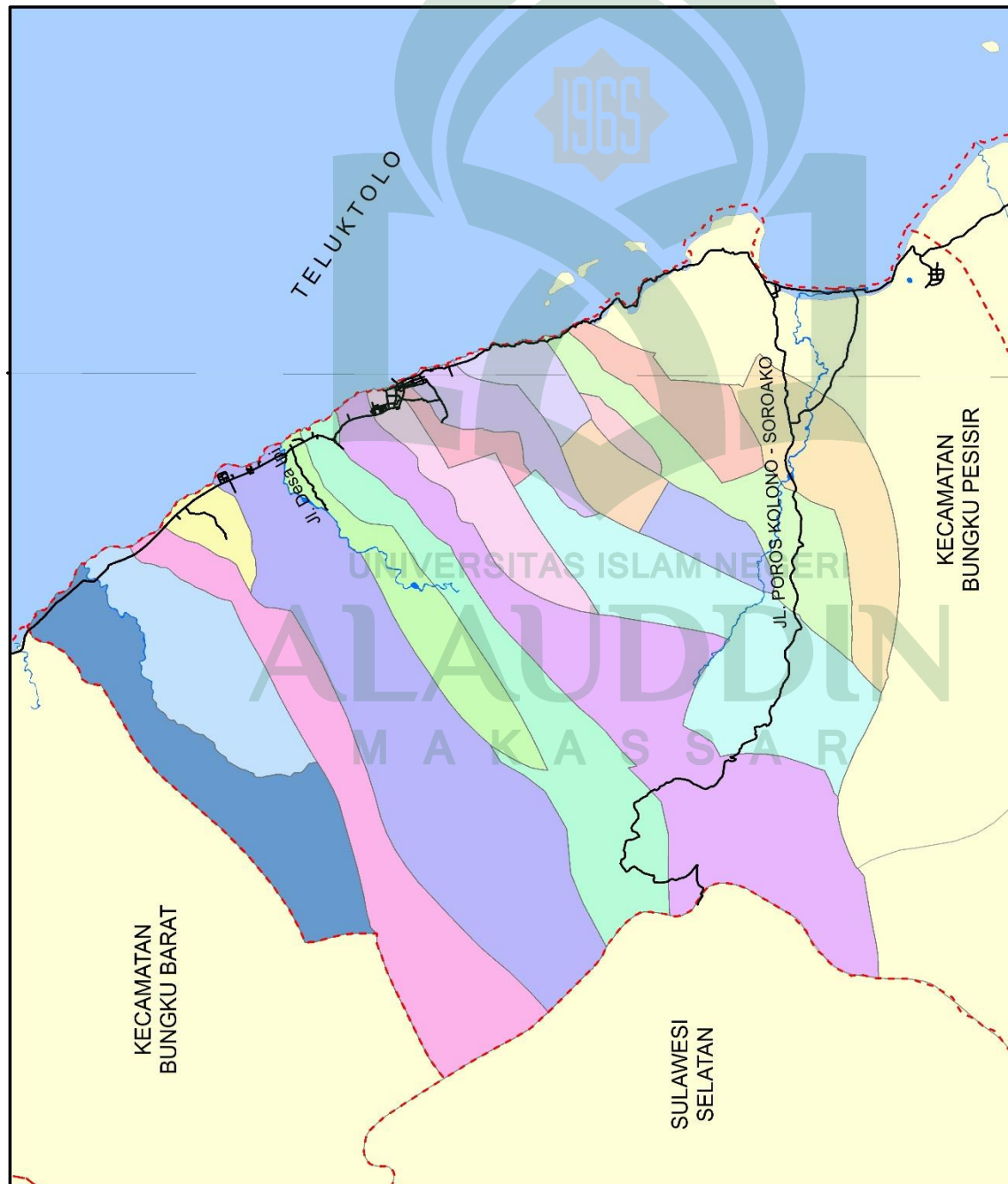
Tabel 11.
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi
Di Kecamatan Bungku Tengah

No	Desa/ Kel	Luas (Km ²)	Presentase (%)
1	Puungkoilu	15,00	2,07
2	Banhontobungku	21,00	2,90
3	Tofuti	13,00	1,79
4	Sakita	62,0	8,55
5	Mendui	0,28	0,04
6	Tofoiso	0,10	0,01
7	Marsaoleh	0,20	0,03
8	Lamberea	45,00	6,20
9	Bungi	25,00	3,45
10	Matano	0,81	0,11
11	Matansala	45,00	6,20
12	Bahoruru	66,0	9,10
13	Ipi	11,00	1,52
14	Bente	110,00	15,16
15	Bahomohoni	113,00	15,58
16	Bahomoleo	66,72	9,20
17	Bahomante	60,37	8,32
18	Lanona	60,89	8,39
19	Tudua	10,00	1,38
Jumlah		725,57	100,00

Sumber : Kecamatan Bungku Tengah Dalam Angka 2015



Gambar 3. Grafik Pembagian Daerah Administrasi Kecamatan Bungku Tengah



KECAMATAN BUNGKU TENGAH



Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar
2016

Judul Skripsi Pengaruh Pengembangan Ruang Kawasan
Perkantoran Terhadap Pembangunan Infrastruktur
Lingkungan di Kecamatan Bungku Tengah
Kabupaten Morowali

No. Peta

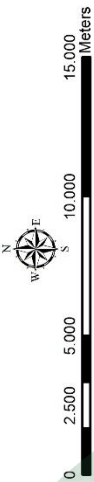
002

Judul Gambar :

PETA ADMINISTRASI

Skala :

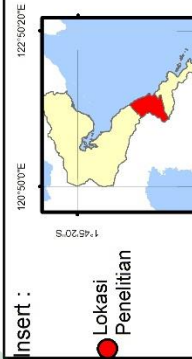
1:250.000



Legenda :

- | | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Batas Administrasi | Bente | Matansala |
| Jalan | Bungu | Mendui |
| sungai | Ipi | Puungkoilu |
| Bahomante | Lamberea | Sakita |
| Bahomohoni | Lanona | Tofoiso |
| Bahomoleo | Marsaaleh | Tofuti |
| Bahontobungku | Matano | Tudua |
| Bahoruru | | |

Insert :



Lokasi Penelitian

Dosen Pembimbing :

1. Ir. H. Syamsuddin DM, M. Si
2. Nursyam Aksa, ST., M. Si

Mahasiswa :

MUH. FARID AW. HASAN (6080011085)

Sumber Peta :

Foto Udara Tahun 2015
Peta Rupa Bumi Tahun 2012

C. Gambaran Lokasi Penelitian




1. Letak Geografis dan Administrasi Lokasi Penelitian

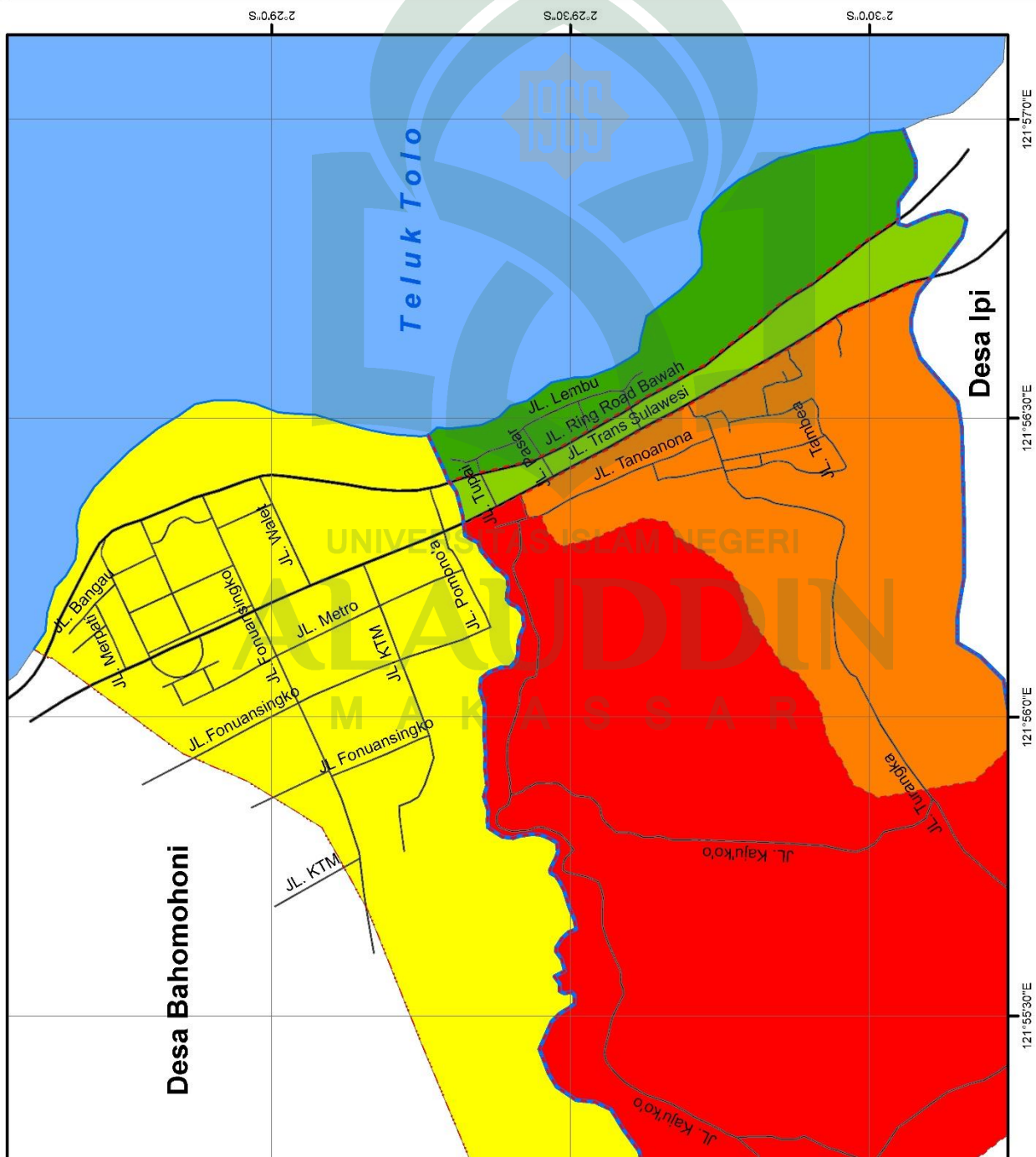
Desa Bente merupakan Desa yang dimana salah satu dusunnya dijadikan sebagai kawasan perkantoran pemerintahan daerah Kabupaten Morowali yang menjadi lokasi penelitian . Secara geografis Desa Bente berada pada titik koordinat yaitu 02,49162000 LS - 121,94037000 BT. Adapun batas- batas administrasi lokasi penelitian yaitu sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bahomohoni.
- Sebelah barat berbatasan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sebelah timur berbatasan Teluk Tolo.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ipi.

Lokasi Penelitian berada pada kawasan perkantoran Fonuansingko yang berada di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah .Luas lokasi penelitian adalah 110,00 Ha dan terdiri dari 5 dusun. Adapun untuk luas kawasan Perkantoran Fonuansingko adalah 4,38 Ha.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta administrasi Desa Bente pada halaman 65.

 <p>TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2017</p>	
<p>Judul Skripsi : Pengaruh Pengembangan Kawasan Ruang Perkantoran Terhadap Pembangunan Infrastruktur Lingkungan di Kecamatan Bungkutengah Kabupaten Morowali</p>	
<p>No. Peta 003</p>	<p>Judul Gambar : Peta Administrasi</p>
<p>Skala : 1:18.000</p> 	
<p>Legenda :</p> <p>Keterangan :</p> <p>Desa Bente</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Desa --- Batas Dusun --- Batas Laut --- Batas Provinsi --- Sungai --- Pantai <ul style="list-style-type: none"> Dusun 1 Dusun 2 Dusun 3 Dusun 4 Dusun 5 	
<p>Insert :</p>  <p>Desa Bente</p>	
<p>Dosen Pembimbing :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. H. Syamsuddin DM, M. Si 2. Nursyam Aksa, ST, M. Si 	
<p>Mahasiswa :</p> <p>Muh. Farid AW Hasan (60800112085)</p>	
<p>Sumber Peta :</p> <p>Foto Udara Tahun 2015 Peta Rupa Bumi Tahun 2012</p>	



DESA BENTE

KECAMATAN BUNGKUTENGAH KABUPATEN MOROWALI

2. Apek Kependudukan

a. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Bente pada tahun 2016 sebanyak 3323 jiwa, tahun 2015 sebanyak 3229 jiwa, tahun 2014 sebanyak 3035 jiwa. tahun 2013 sebanyak 2785 jiwa dan tahun 2012 sebanyak 2461 jiwa. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk di Kecamatan Bahodopi dapat di lihat pada tabel 12 berikut :

Tabel 12.
Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
Desa Bente tahun 2012– 2016

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertambahan (Jiwa)
1	2012	2461	-
2	2013	2785	324
3	2014	3035	250
4	2015	3229	194
5.	2016	3323	94
	Jumlah	14833	862

Sumber :Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali
Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah pertumbuhan penduduk di Desa Bente dimana pertumbuhan penduduknya mengalami pertambahan setiap tahunnya.

b. Analisis Kependudukan

Berdasarkan data yang peroleh, jumlah penduduk kawasan penelitian pada tahun akhir yaitu tahun 2016 terjadi pertambahan jumlah penduduk menjadi 3323. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel 13 berikut:

Tabel 13.
Perkembangan Penduduk
di Desa Bente Tahun 2012 -2016

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertambahan (Jiwa)
1	2012	2461	-
2	2013	2785	324
3	2014	3035	250
4	2015	3229	194
5	2016	3323	94
Rata-Rata			862

Sumber: Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2012- 2016 jumlah penduduk cenderung meningkat, dengan mempergunakan data 5 tahun terakhir ini kami mencoba memproyeksi penduduk di Kawasan Penelitian 5 tahun ke depan yakni tahun sarana dengan menggunakan metode ekstrapolasi. Adapun proyeksi penduduk dilakukan dengan menggunakan metode proyeksi pola ekstrapolasi, yaitu :

$$P_n = P_0 + b.\emptyset$$

Keterangan:

P_n = Jumlah penduduk yang akan diproyeksi

P_0 = Jumlah penduduk tahun akhir

b = Rata-rata pertumbuhan penduduk

\emptyset = Tahun proyeksi-Tahun akhir

• **Proyeksi Penduduk Tahun 2021**

$$P_0 = 3323 \text{ jiwa}$$

$$b = 862$$

$$\emptyset = 2021-2016 = 5$$

$$P_{2021} = 3323 + 862 (1)$$

$$P_{2021} = 4.185 \text{ jiwa}$$

Berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2021 jumlah penduduk meningkat menjadi 4.185 Jiwa.

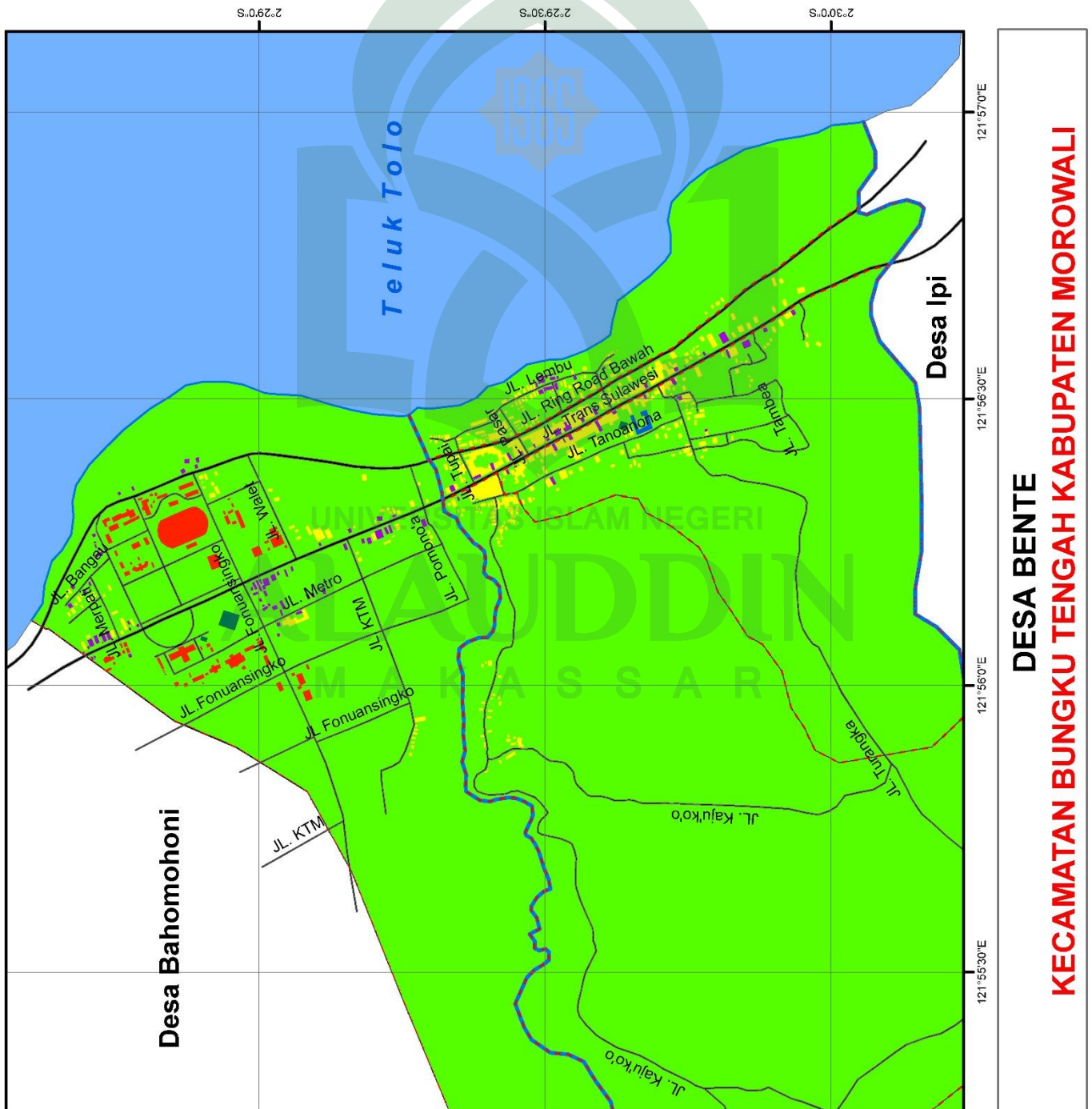
3. Penggunaan Lahan


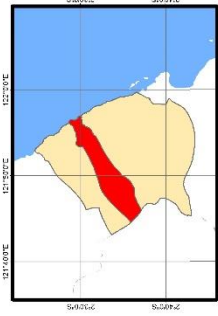
Penggunaan lahan di lokasi penelitian mengalami perubahan setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi oleh aktivitas dan pertumbuhan penduduk yang mendiami kawasan. Pemanfaatan lahan pada lokasi penelitian terdiri dari pendidikan, perdagangan dan jasa, peribadatan, perkantoran, dan permukiman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 14, dan peta penggunaan lahan pada halaman 69.

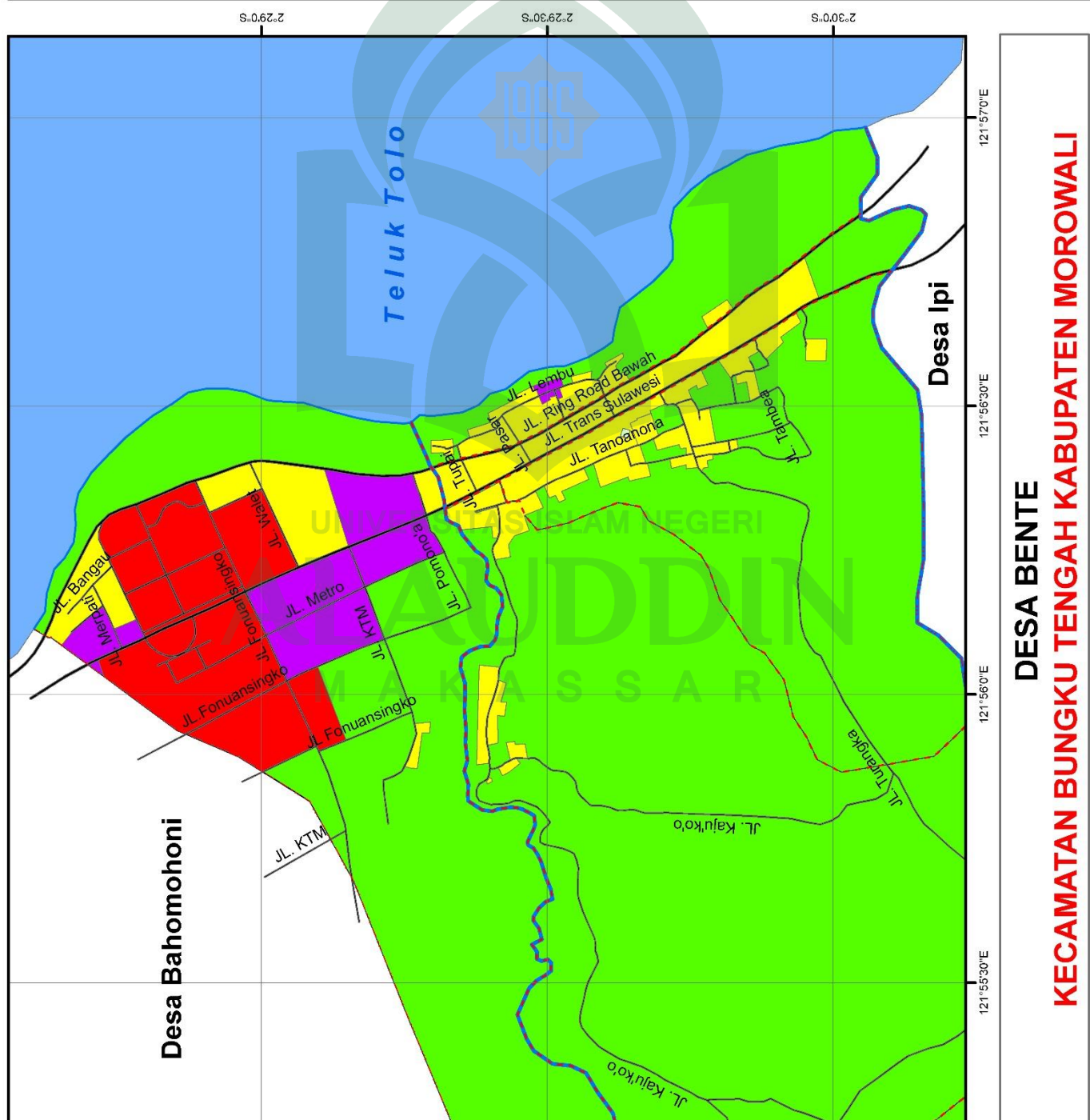
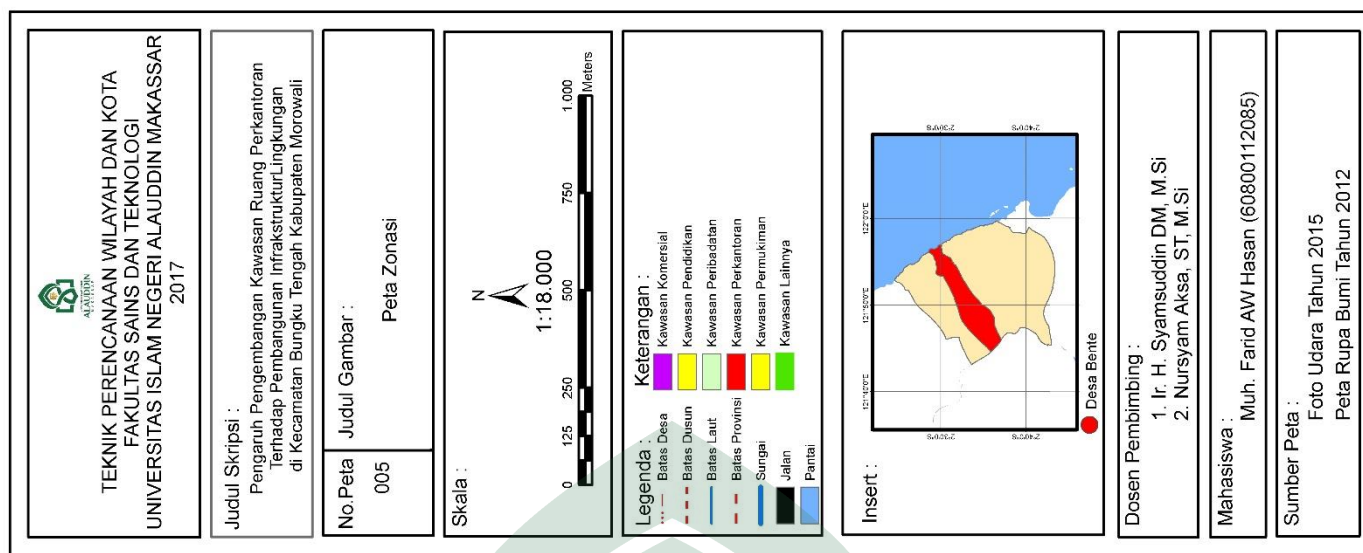
Tabel 14.
Penggunaan Lahan Pada Lokasi Penelitian

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Permukiman	10,11
2	Perkantoran	4,38
3	Peribadatan	0,38
4	Perdagangan dan Jasa	1,99
5	Pendidikan	0,22
6	Jalan	14,5
7	Perkebunana dan RTH	78,42
Jumlah		110,00

Sumber : Interpretasi Citra (Gis) dan Survey Lapangan, 2017



 <p>TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2017</p>	
<p>Judul Skripsi : Pengaruh Pengembangan Kawasan Ruang Perkantoran Terhadap Pembangunan Infrastruktur Lingkungan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali</p>	
<p>No. Peta 004</p>	<p>Judul Gambar : Peta Penggunaan Lahan</p>
<p>Skala : 1:18.000</p> <p>0 125 250 500 750 1.000 Meters</p>	
<p>Keterangan :</p> <p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> • • • • • Batas Desa - - - - - Batas Dusun - - - - - Batas Laut - - - - - Batas Provinsi - - - - - Sungai - - - - - Pantai ■ Pendidikan ■ Perdagangan Jasa ■ Peribadatan ■ Perkantoran ■ Permukiman ■ Ruang Terbuka Hijau 	
<p>Insert :</p>  <p>Desa Bente</p>	
<p>Dosen Pembimbing :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. H. Syamsuddin DM, M.Si 2. Nursyam Aksa, ST, M.Si 	
<p>Mahasiswa :</p> <p>Muh. Farid AWW Hasan (60800112085)</p>	
<p>Sumber Peta :</p> <p>Foto Udara Tahun 2015 Peta Rupa Bumi Tahun 2012</p>	



D. Kondisi Infrastruktur Pada Kawasan Penelitian

Pada tahun 1999 kawasan perkantoran berada di Kecamatan Kolonodale , namun pada tahun 2006 terjadi perpindahan kawasan perkantoran ke Desa Bente Kecamatan Bungku tengah . Kawasan perkantoran Bumi Fonuansingko merupakan salah satu kawasan yang mempengaruhi perkembangan infrastruktur, dengan adanya kawasan tersebut tingkat aktifitas masyarakat di Desa Bente semakin meningkat. Peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk di Desa Bente disebabkan karena banyaknya pegawai dari luar daerah yang membangun rumah di kawasan tersebut agar akses menuju ke kantor sangat dekat . Selain kawasan perkantoran adanya rumah sakit dan kota terpadu mandiri (KTM) juga menjadi daya tarik masyarakat untuk tinggal di Desa Bente dan menyebabkan banyaknya pembangunan perdagangan dan jasa . untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Jaringan Jalan

Berdasarkan data dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dan hasil survey lapangan yang dilakukan di Desa Bente kondisi jaringan jalan di desa bente memiliki panjang yaitu 27,81 km . untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 15, dan peta No 06, dan No 07 pada halaman 80 dan 81.

Tabel 15.
Jaringan Jalan Desa Bente

NO	Nama Jalan	Panjang Jalan (Km)	Lebar Jalan (m)	Fungsi Jalan	Kondisi	Gambar
1	JL. Ring Road Bawah	3,66	8	Jalan Primer	Baik	
2	JL. Trans Sulawesi	3,40	8	Jalan Primer	Baik	
3	JL. Fonuansingko	6,16	4	Jalan Lingkungan	Baik	
4	JL. Metro	0,63	4	Jalan Lingkungan	Baik	
5	JL. Pomono'a	0,33	4	Jalan Lingkungan	Buruk	
6	JL. Walet	0,37	4	Jalan Lingkungan	Buruk	
7	JL. Bangau	0,21	4	Jalan Lingkungan	Buruk	
8	JL. Merpati	0,22	4	Jalan Lingkungan	Buruk	

9	JL. Tanoanona	0,99	4	Jalan Lingkungan	Buruk	
10	JL. Turangka	2,66	4	Jalan Lingkungan	Buruk	
11	JL. Tambea	1,74	4	Jalan Lingkungan	Buruk	
12	JL. Kaju'ko'o	5,78	4	Jalan Lingkungan	Buruk	
13	JL. Lembu	0,78	4	Jalan Lingkungan	Buruk	
14	Jl. Pasar	0,21	4	Jalan Lingkungan	Buruk	
15	JL. Tupai	0,05	4	Jalan Lingkungan	Baik	
16	JL. KTM	0,62	4	Jalan Lingkungan	Buruk	
Jumlah panjang jalan						27,81 km

Sumber : Hasil Survey tahun 2017

2. Jaringan Air Bersih

Pada tahun 2013 pembangunan bak penampungan air Pdam di Desa Ipi telah diresmikan dan di fungsikan untuk menyediakan kebutuhan air di Kecamatan Bungku Tengah. Berdasarkan data dari kantor Pdam dan hasil survey lapangan jumlah kk yang menggunakan instalasi air bersih di Desa Bente berjumlah 16 kk, sedangkan untuk kawasan perkantoran berjumlah 4 kantor/ instansi yaitu kantor bupati, kantor dinas nakertrans, kantor BNN, dan rumah sakit , sedangkan untuk kawasan pendidikan berjumlah 1 yaitu SMAN 2 Bungku Tengah. Jumlah pengguna instalasi Pdam di Desa Bente yaitu 16 instalasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta No. 008 pada halaman 82



Gambar 8. Kondisi PDAM

3. Jaringan Listrik

Pembangkit listrik di Kecamatan Bungku Tengah pertama kali menggunakan PLTD . Pada tahun 2006 - 2008 jaringan listrik di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali belum memadai karena saat itu jaringan listrik menyala hanya 6 jam/ hari, untuk tahun 2009 – 2010 jaringan listrik menyala mengalami peningkatan menjadi 12 jam/hari, sedangkan pada tahun 2011 sampai saat ini jaringan listrik menyala selama 24 jam, peningkatan jaringan listrik disebabkan karena bertambahnya pembangkit listrik yaitu dengan adanya PLTA. Berdasarkan hasil survey lapangan dan instansi di Desa Bente, untuk kebutuhan listrik sudah memadai, meningkatnya jumlah penduduk tiap tahun juga meningkatkan kebutuhan listrik, dimana jumlah kebutuhan listrik yang digunakan di kawasan permukiman terbagi atas 2 daya tegangan listrik daya 900 watt yang berjumlah 443 kk untuk type rumah kecil dan sedang, sedangkan yang terakhir tegangan listrik daya 1300 watt berjumlah 222 kk untuk type rumah besar , untuk jumlah kebutuhan listrik di kawasan permukiman sebesar 337950 watt .adapun untuk kawasan perkantoran daya tegangan listrik terbagi atas 2 daya tegangan listrik yaitu, tegangan listrik daya 1300 watt berjumlah 31 instansi, tegangan listrik daya 2200 watt berjumlah 6 instansi, untuk jumlah kebutuhan listrik di kawasan perkantoran sebesar 53500 watt adapun untuk untuk kawasan perdagangan dan jasa daya tegangan listrik terbagi atas 2 daya tegangan listrik yaitu, tegangan listrik daya 1300 watt berjumlah 18 unit , tegangan listrik daya 2200 watt berjumlah 7 unit, untuk kebutuhan listrik kawasan perdagangan yaitu 38.800 watt , untuk kawasan pendidikan daya tegangan listrik yang digunakan

adalah 1300 watt 1 unit untuk kebutuhan listrik kawasan pendidikan adalah 1300 watt, untuk kawasan peribadatan daya tegangan listrik yang digunakan adalah 1300 watt 1 unit untuk kebutuhan listrik kawasan peribadatan adalah 1300 watt sedangkan untuk kebutuhan listrik penerangan jalan sebesar 21.000 watt. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini dan peta No. 009 pada halaman 83



Gambar 9. Penerangan Jalan
Desa Bente



Gambar 10. Jaringan Listrik Desa Bente

4. Jaringan Drainase

Berdasarkan hasil survey lapangan dan instansi ketersediaan drainase di Desa Bente masih sangat kurang , hal ini dapat dilihat masi banyaknya jaringan jalan yang belum memiliki drainase, dan masih banyak yang belum terhubung antar drainase lainnya menuju ke drainase primer. untuk di kawasan permukiman ketersediaan jaringan drainase berada pada jalan Fonuansingko, jalan Tanoanona, dan jalan Tupai dengan panjang drainase 7,7 km lebar 30-60 Cm dan kondisi drainase buruk .untuk kawasan perksantoran sudah memiliki jaringan drainse dengan lebar 60 Cm, namun kondisi jaringan drainase masih buruk, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya sampah yang berada didalam drainase yang

mengakibatkan tidak mengalirnya air . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta No. 010, No. 011 pada halaman 84, 85 dan Tabel 16 berikut ini.

Tabel 16.
Kondisi ketersediaan Jaringan Drainase Desa Bente

No	Nama Jalan	Lebar Drainase (Cm)	Panjang Drainase (Km)	Kondisi Drainase
1.	Jalan Fonuansingko	30	6,16	Buruk
2.	Jalan Tanoanona	60	0,99	Buruk
3.	Jalan Tupai	30	0,05	Buruk
Jumlah			7,7 km	

Sumber : Survey Lapangan Tahun 2017



Gambar 11. Kondisi Drainase Desa Bente Tahun 2017

5. Sistem Persampahan

Saat ini Kabupaten Morowali belum memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yang terkumpul diangkut dan di timbun / dibakar dilahan kosong milik pemerintah lahan rencana kota mandiri (KTM) Morowali di Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah, sedangkan rencana lokasi TPA mempunyai 2 alternatif :

1. Lahan di dalam kota mandiri Morowali di Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah (proses pembahasan).
2. Perbatasan Desa Pongkoilu Kecamatan Bungku Tengah dan Desa Lahuafu Kecamatan Bungku Timur, dengan jarak 9 km dari pusat kota seluas 5 Ha (proses pembebasan tanah).

Sistem persampahan di Desa Bente masyarakat masih menggunakan sistem individual, namun untuk kawasan perkantoran ,yang berada di Desa Bente sudah terdapat 3 TPS , sedangkan untuk sistem pengelolaan sampah di kawasan tersebut, untuk tahap pengumpulan masih bersifat komunal, belum ada yang bersifat door to door, untuk tahap pengangkutan belum dilakukan pengangkutan 3 kali seminggu, 1 rit/truck, serta untuk tahap pengolahan belum ada sistem 3 R (reuse, reduce, recicly) baik di sumber sampah maupun di TPA , tidak ada pengomposan dan pemilahan, pembakar dilakukan di TPS atau di pengumpulan – pengumpulan liar. Sedangkan tahap pemprosesan akhir masih bersifat open damping dan sampah yang dilakukan begitu saja, dan linggih sampah mengalir ketempat terbuka . Volume timbulan sampah permukiman tahun 2016 Desa Bente yaitu 2,87 liter/ perhari, untuk kawasan pendidikan 1 liter/perhari dengan jumlah sarana persampahan yaitu 3 bak sampah dan 1 kontainer yang tersebar di kawasan perkantoran. (Laporan akhir penyusunan PTPM Kabupaten Morowali). Adapun kondisi sistem pengolahan sampah dapat dilihat pada gambar dibawah ini dan pada peta No. 12 pada halaman 86.



Gambar 12. Pengolahan Individual



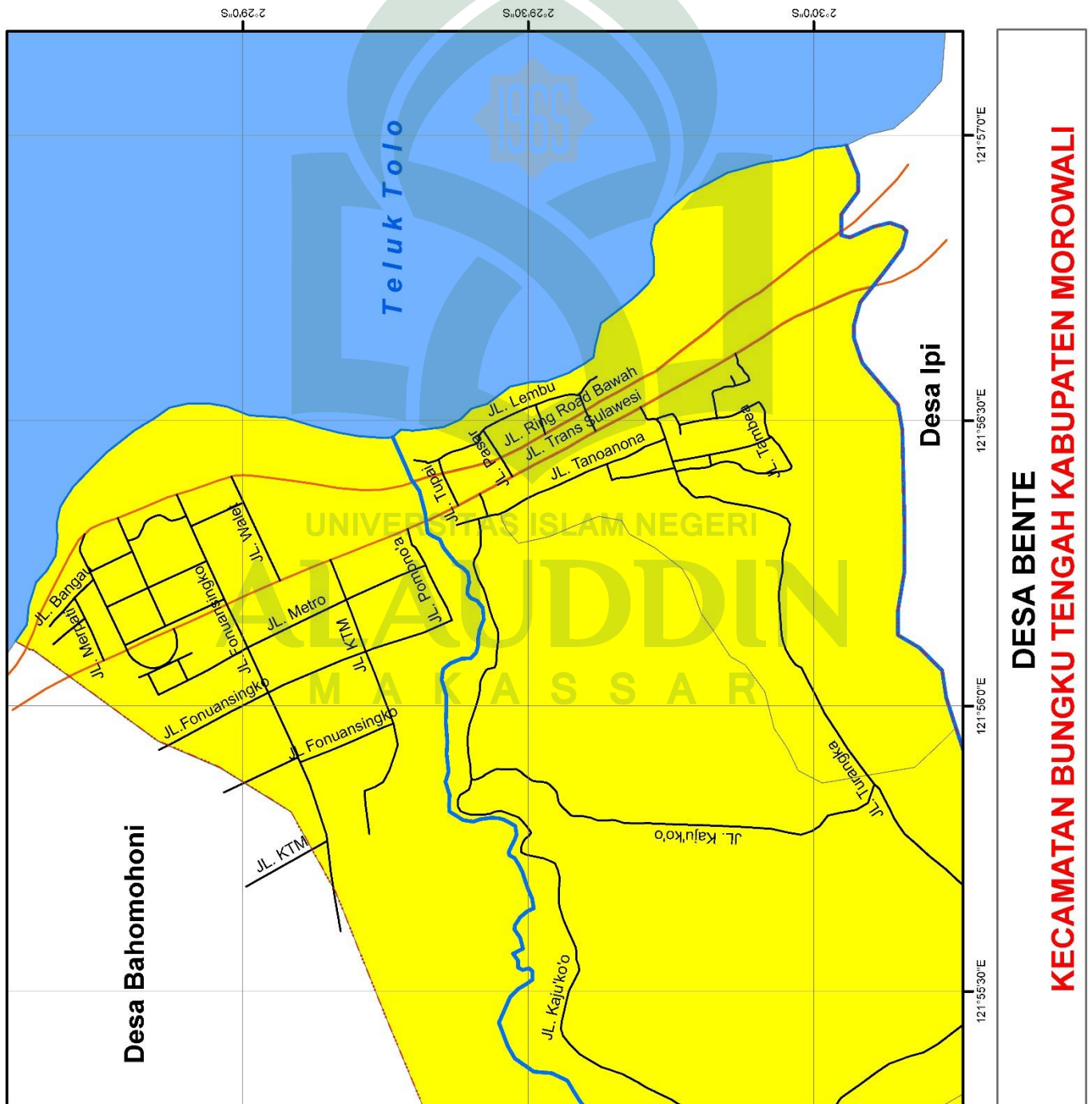
Gambar 13. Pengolahan Komunal



6. Aksesibilitas



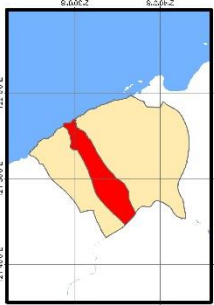
Berdasarkan dari hasil survey yang dilakukan aksesibilitas jarak tempuh kawasan perkantoran ke ibu kota Kecamatan yaitu 11 km/jam dengan kondisi jaringan jalan sangat baik , dengan waktu tempuh selama 18 menit, dengan kecepatan rata- rata motor adalah 60 km/jam, untuk aksesibilitas jarak tempuh kawasan perkantoran ke pelabuhan Bungku yaitu 10 km, dengan kondisi jaringan jalan sangat baik, dengan waktu tempuh selama 16 menit , dengan kecepatan rata- rata motor adalah 60 km/jam, sedangkan aksesibilitas jarak tempuh kawasan perkantoran ke terminal dan yaitu 8 km, dengan kondisi jaringan jalan sangat baik, dan waktu tempuh selama 13 menit, dengan kecepatan rata- rata motor adalah 60 km/jam.

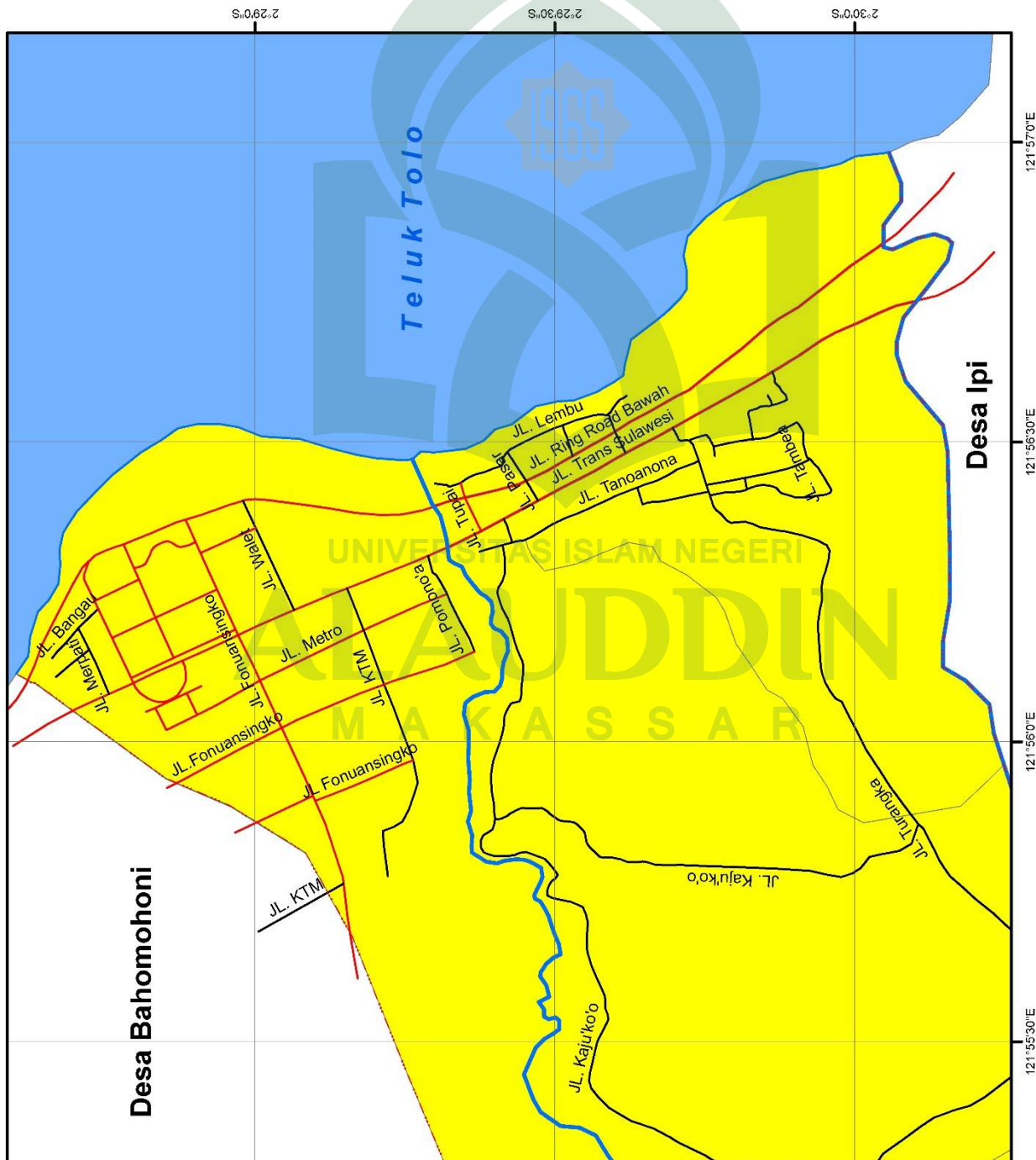


Gambar 14. Kondisi Jalan






 <p>TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2017</p>	
<p>Judul Skripsi : Pengaruh Pengembangan Kawasan Ruang Perkantoran Terhadap Pembangunan Infrastruktur Lingkungan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali</p>	
<p>No. Peta 006</p>	<p>Judul Gambar : Peta Fungsi Jalan</p>
<p>Skala : 1:18.000</p> <p>0 125 250 500 750 1.000 Meters</p>	
<p>Keterangan :</p> <p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Desa Batas Laut Batas Provinsi Sungai Pantai Jalan Lingkungan Jalan Arteri Desa Bente 	
<p>Insert :</p>  <p>Desa Bente</p>	
<p>Dosen Pembimbing :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. H. Syamsuddin DM, M. Si 2. Nursyam Aksa, ST, M. Si 	
<p>Mahasiswa :</p> <p>Muh. Farid AW Hasan (60800112085)</p>	
<p>Sumber Peta :</p> <p>Foto Udara Tahun 2015 Peta Rupa Bumi Tahun 2012</p>	

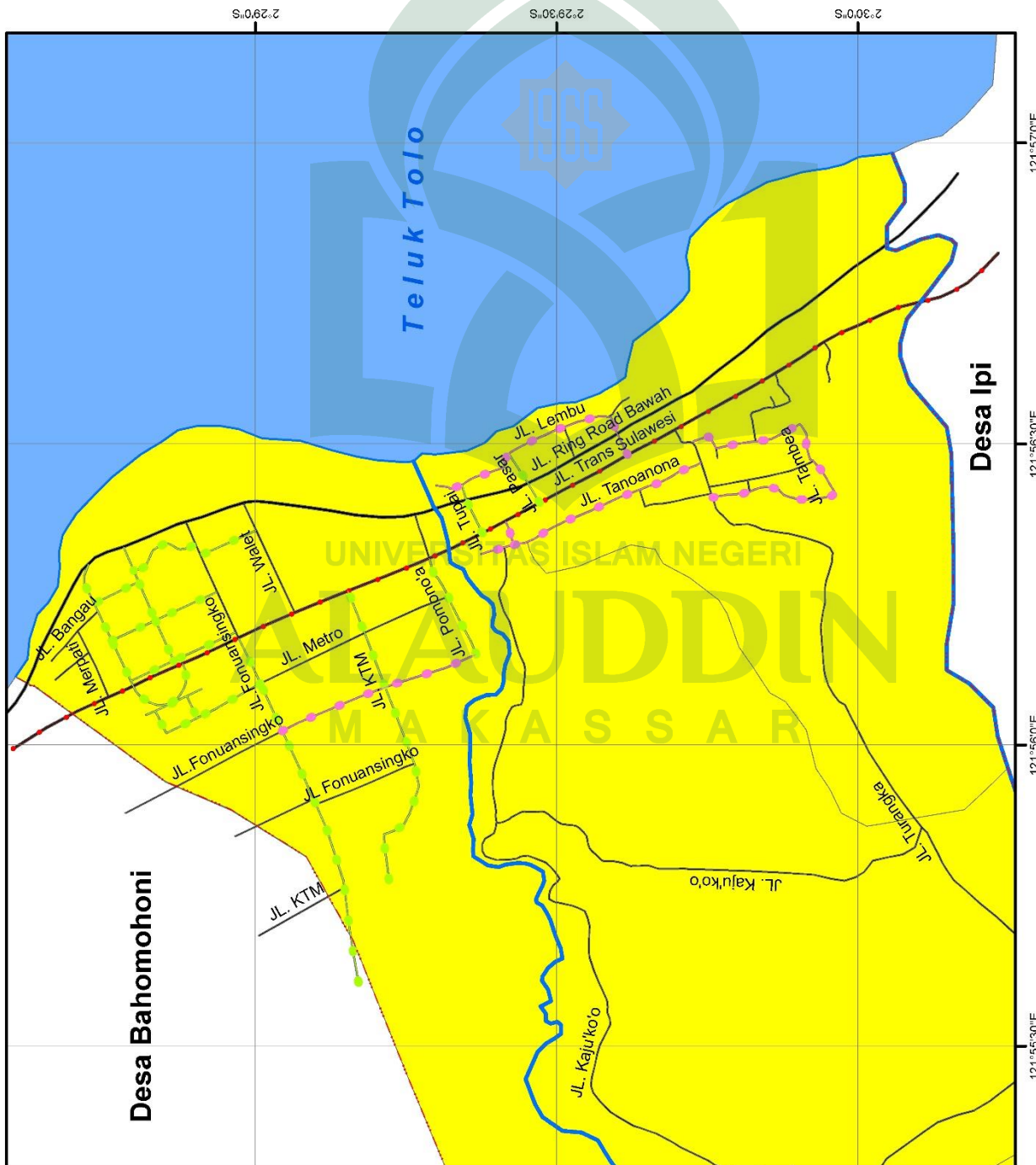
 <p>TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2017</p>									
<p>Judul Skripsi : Pengaruh Pengembangan Kawasan Ruang Perkantoran Terhadap Pembangunan Infrastruktur Lingkungan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali</p>									
No. Peta 007	Judul Gambar : Peta Kondisi Jalan								
<p>Skala : 1:18.000</p> 									
<p>Legenda :</p> <table border="0"> <tr> <td>--- Batas Desa</td> <td>— Jalan Baik</td> </tr> <tr> <td>--- Batas Laut</td> <td>— Jalan Buruk</td> </tr> <tr> <td>--- Batas Provinsi</td> <td>■ Desa Bente</td> </tr> <tr> <td>— Sungai</td> <td>— Pantai</td> </tr> </table>		--- Batas Desa	— Jalan Baik	--- Batas Laut	— Jalan Buruk	--- Batas Provinsi	■ Desa Bente	— Sungai	— Pantai
--- Batas Desa	— Jalan Baik								
--- Batas Laut	— Jalan Buruk								
--- Batas Provinsi	■ Desa Bente								
— Sungai	— Pantai								
<p>Insert :</p>  <p>Desa Bente</p>									
<p>Dosen Pembimbing : 1. Ir. H. Syamsuddin DM, M. Si 2. Nursyam Aksha, ST, M. Si</p>									
<p>Mahasiswa : Muh. Farid AW Hasan (60800112085)</p>									
<p>Sumber Peta : Foto Udara Tahun 2015 Peta Rupa Bumi Tahun 2012</p>									



DESA BENTE

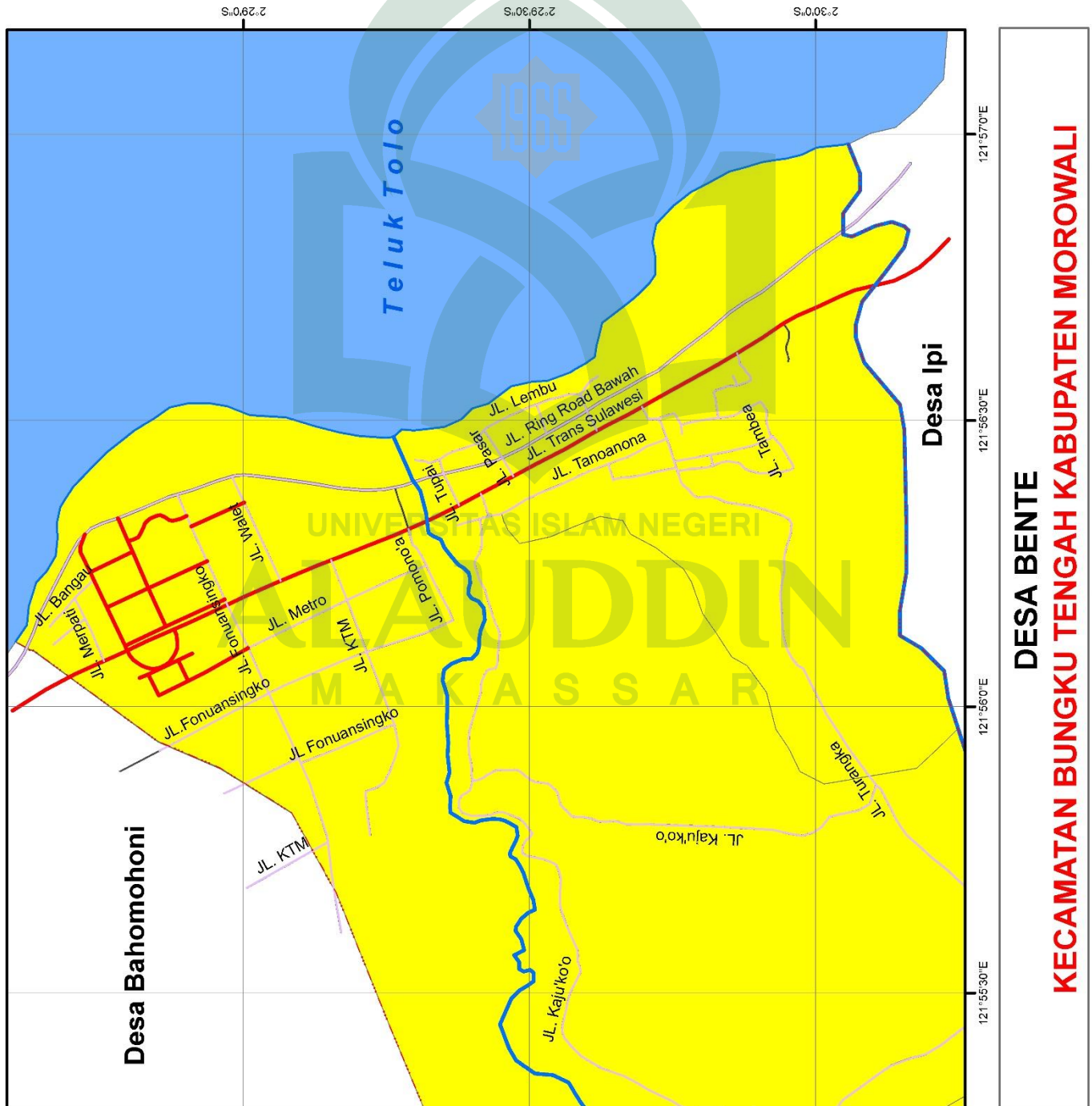
KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI




 <p>TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2017</p>																					
<p>Judul Skripsi : Pengaruh Pengembangan Kawasan Ruang Perkantoran terhadap Pembangunan Infrastruktur Lingkungan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali</p>																					
<p>No. Peta 008</p>	<p>Judul Gambar : Peta Jaringan Air Bersih</p>																				
<p>Skala : 1:18.000</p> 																					
<p>Keterangan :</p> <table border="0"> <tr> <td>—</td> <td>Jalan</td> </tr> <tr> <td>---</td> <td>Batas Desa</td> </tr> <tr> <td>---</td> <td>Batas Laut</td> </tr> <tr> <td>---</td> <td>Batas Provinsi</td> </tr> <tr> <td>---</td> <td>Sungai</td> </tr> <tr> <td>---</td> <td>Pantai</td> </tr> <tr> <td>---</td> <td>Desa Bente</td> </tr> <tr> <td>---</td> <td>Pipa Primer</td> </tr> <tr> <td>---</td> <td>Pipa Sekunder</td> </tr> <tr> <td>---</td> <td>Pipa Tersier</td> </tr> </table>		—	Jalan	---	Batas Desa	---	Batas Laut	---	Batas Provinsi	---	Sungai	---	Pantai	---	Desa Bente	---	Pipa Primer	---	Pipa Sekunder	---	Pipa Tersier
—	Jalan																				
---	Batas Desa																				
---	Batas Laut																				
---	Batas Provinsi																				
---	Sungai																				
---	Pantai																				
---	Desa Bente																				
---	Pipa Primer																				
---	Pipa Sekunder																				
---	Pipa Tersier																				
<p>Insert :</p> 																					
<p>Dosen Pembimbing : 1. Ir. H. Syamsuddin DM, M.Si 2. Nursyam Aksa, ST, M.Si</p>																					
<p>Mahasiswa : Muh. Farid AW Hasan (60800112085)</p>																					
<p>Sumber Peta : Foto Udara Tahun 2015 Peta Rupa Bumi Tahun 2012</p>																					



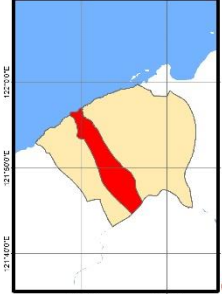


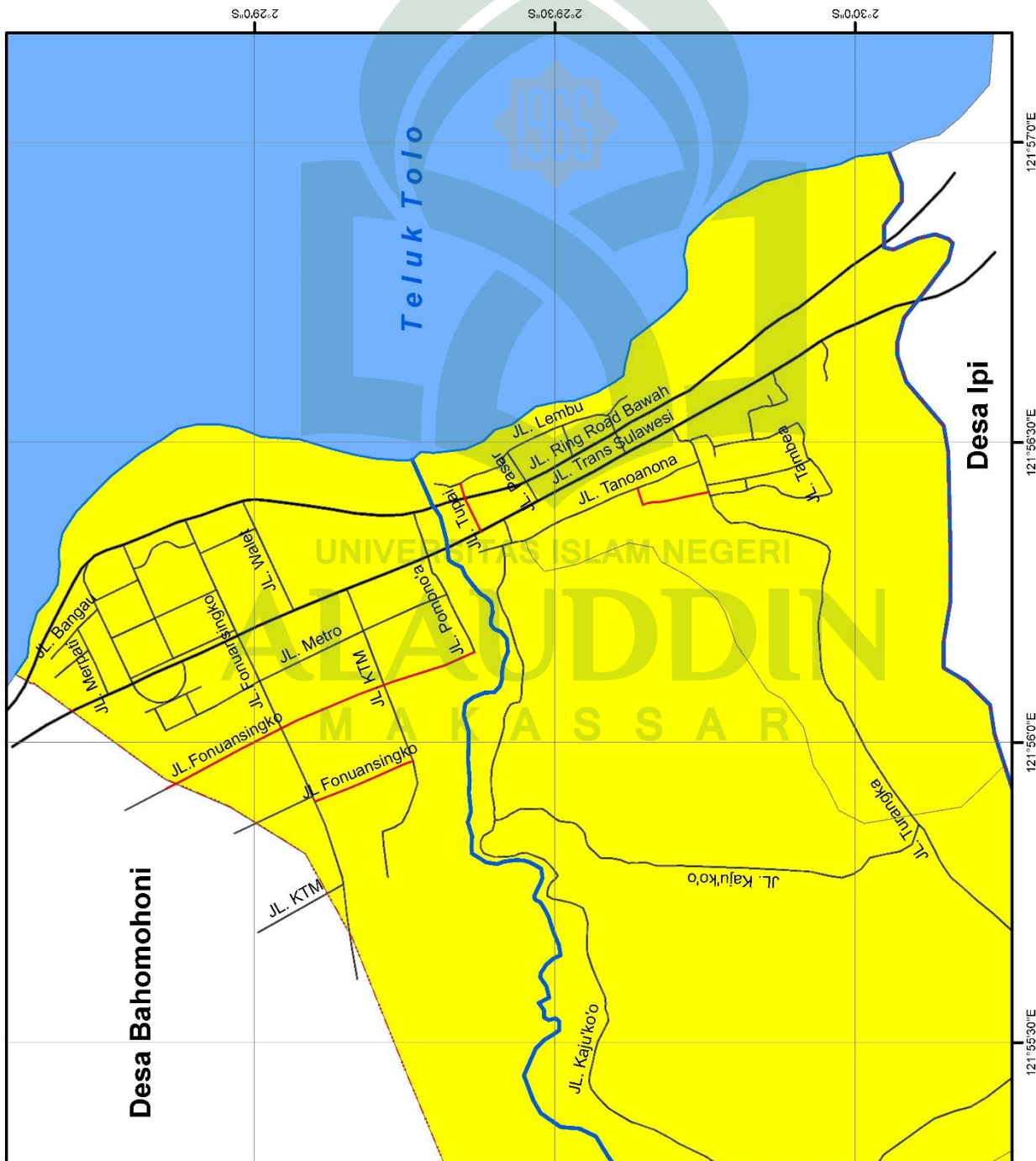
DESA BENTE

KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI



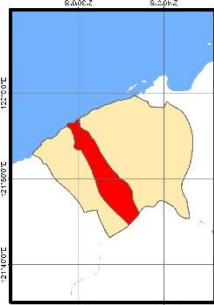


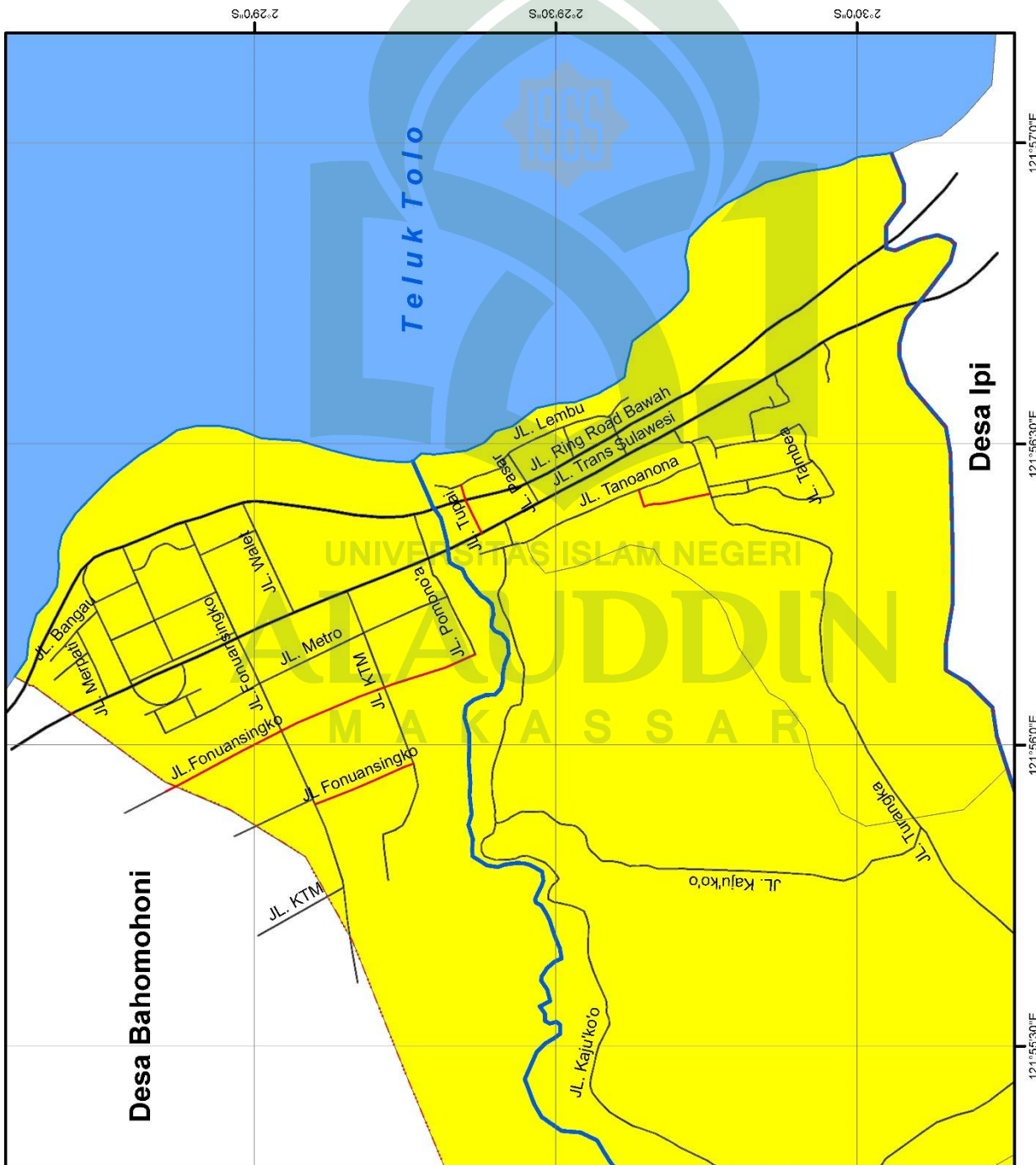
 <p>TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2017</p>	
<p>Judul Skripsi : Pengaruh Pengembangan Kawasan Ruang Perkantoran terhadap Pembangunan Infrastruktur Lingkungan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali</p>	
No.Peta 009	Judul Gambar : Peta Jaringan Listrik
<p>Skala : 1:18.000</p> 	
<p>Keterangan :</p> <p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Desa --- Batas Laut --- Batas Provinsi --- Sungai --- Tegangan Menengah --- Tegangan Rendah --- Desa Bente --- Pantai 	
<p>Insert :</p>  <p>Desa Bente</p>	
<p>Dosen Pembimbing :</p> <p>1. Ir. H. Syamsuddin DM, M. Si 2. Nursyam Aksa, ST, M. Si</p>	
<p>Mahasiswa : Muh. Farid AW Hasan (60800112085)</p>	
<p>Sumber Peta : Foto Udara Tahun 2015 Peta Rupa Bumi Tahun 2012</p>	

 <p>TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2017</p>		<p>Judul Skripsi : Pengaruh Pengembangan Kawasan Ruang Perkantoran Terhadap Pembangunan Infrastruktur Lingkungan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali</p>	<p>No. Peta 010</p>	<p>Judul Gambar : Peta fungsi Drainase</p>	<p>Skala : 1:18.000</p> 	<p>Keterangan :</p> <p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Desa Batas Laut Batas Provinsi Sungai Tersier Desa Bente Pantai Jalan 	<p>Insert :</p> 	<p>Dosen Pembimbing :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. H. Syamsuddin DM, M. Si 2. Nursyam Aksa, ST, M. Si 	<p>Mahasiswa : Muh. Farid AW Hasan (60800112085)</p>	<p>Sumber Peta : Foto Udara Tahun 2015 Peta Rupa Bumi Tahun 2012</p>
---	--	--	-------------------------	--	---	---	--	--	--	--





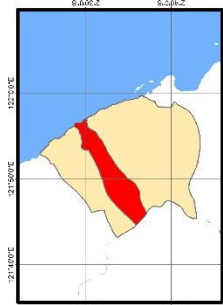
DESA BENTE
KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI

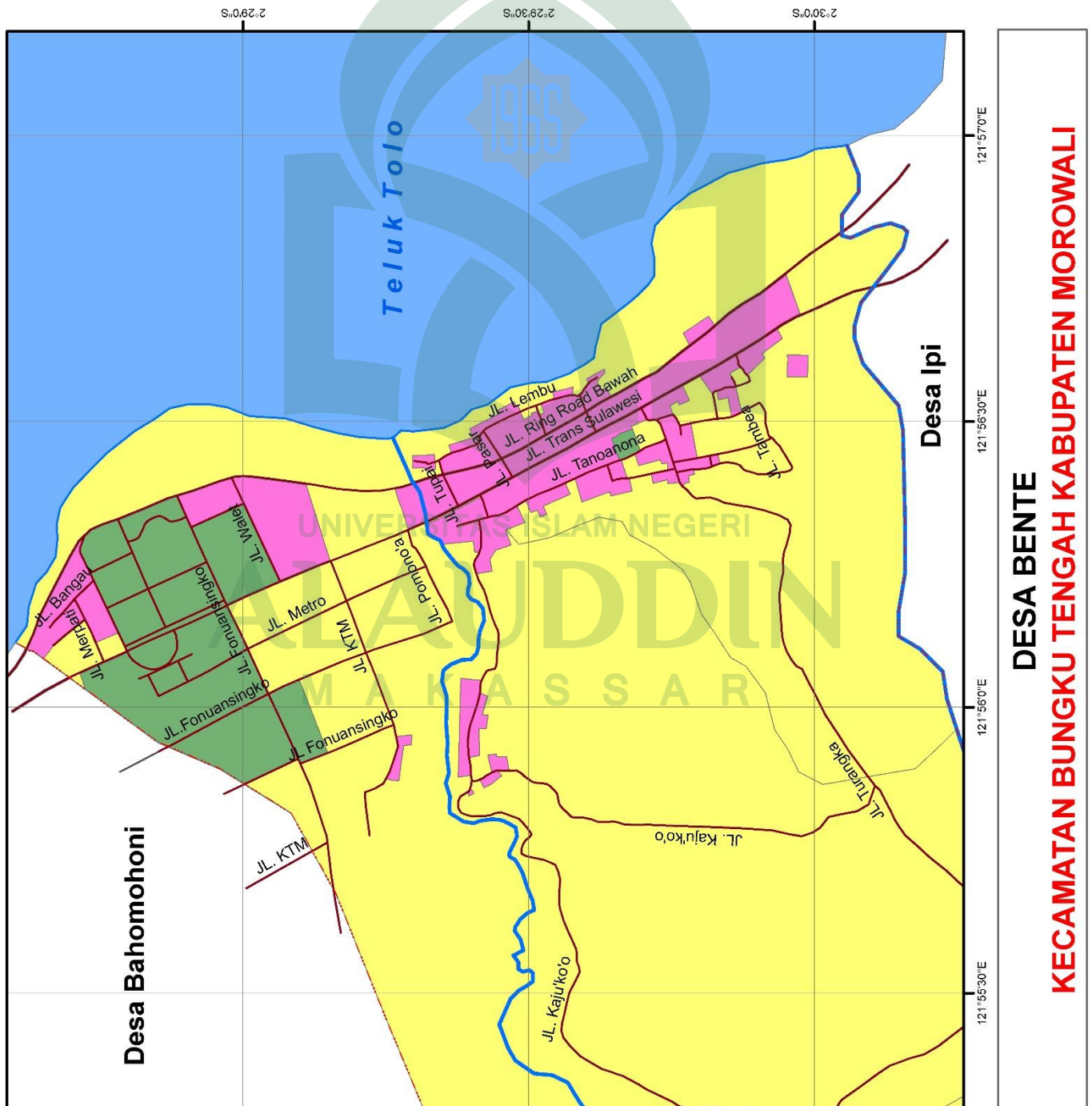
 <p>TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2017</p>									
<p>Judul Skripsi : Pengaruh Pengembangan Kawasan Ruang Perkantoran terhadap Pembangunan Infrastruktur Lingkungan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali</p>									
No. Peta 011	Judul Gambar : Peta Kondisi Drainase								
<p>Skala : 1:18.000</p> 									
<p>Legenda :</p> <table border="0"> <tr> <td>--- Batas Desa</td> <td>— Buruk</td> </tr> <tr> <td>— Batas Laut</td> <td>— Desa Bente</td> </tr> <tr> <td>--- Batas Provinsi</td> <td>— Pantai</td> </tr> <tr> <td>— Sungai</td> <td>— Jalan</td> </tr> </table>		--- Batas Desa	— Buruk	— Batas Laut	— Desa Bente	--- Batas Provinsi	— Pantai	— Sungai	— Jalan
--- Batas Desa	— Buruk								
— Batas Laut	— Desa Bente								
--- Batas Provinsi	— Pantai								
— Sungai	— Jalan								
<p>Insert :</p> 									
<p>Dosen Pembimbing :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. H. Syamsuddin DM, M.Si 2. Nursyam Aksa, ST, M.Si 									
<p>Mahasiswa : Muh. Farid AW Hasan (60800112085)</p>									
<p>Sumber Peta : Foto Udara Tahun 2015 Peta Rupa Bumi Tahun 2012</p>									



DESA BENTE

KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI

 <p>TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2017</p>	
<p>Judul Skripsi : Pengaruh Pengembangan Kawasan Ruang Perkantoran Terhadap Pembangunan Infrastruktur Lingkungan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali</p>	
No. Peta 012	Judul Gambar : Peta Sistem Persampahan
<p>Skala : 1:18.000</p> 	
<p>Keterangan :</p> <p>Legenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Desa Sistem persampahan Komunal Batas Laut Sistem Persampahan Individual Batas Provinsi Desa Bente Sungai Jalan Pantai 	
<p>Insert :</p>  <p>Desa Bente</p>	
<p>Dosen Pembimbing :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. H. Syamsuddin DM, M. Si 2. Nursyam Aksa, ST, M. Si 	
<p>Mahasiswa : Muh. Farid AW Hasan (60800112085)</p>	
<p>Sumber Peta : Foto Udara Tahun 2015 Peta Rupa Bumi Tahun 2012</p>	



E. Hasil Analisis Ketersediaan Infrastruktur Kawasan Penelitian

1. Jaringan Jalan

Pembangunan infrastruktur jaringan jalan bertujuan untuk mendukung dan mempercepat aktivitas lalu lintas barang maupun manusia dari suatu tempat ketempat lain, dan membentuk struktur ruang wilayah.

Jaringan jalan memiliki SPM 40-60m / Ha dengan lebar 2-5 m. jalan lingkungan yang ada di Desa Bente masing-masing memiliki panjang 27,81 km dengan lebar jalan 4 meter. untuk mengetahui persentase ketersediaan panjang jalan maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Persentase (\%) Jalan} &= \frac{\text{Ketersediaan}}{\text{SPM}} \times 100 \\ &= \frac{27810}{6600} \times 100 \\ &= 421 \%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa persentase ketersediaan panjang jalan di Desa Bente yaitu 421 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 17 berikut ini :

Tabel 17.

Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Jalan

No	Uraian	Standar SPM	Jumlah Ideal	Ketersediaan	Penilaian	Skor
1	Jaringan Jalan	40/60 m/Ha lebar 2-5 m	6600 m	27810 m lebar 4 m	421%	5
Penilaian						421%
Jumlah Skor						5
Nilai Rata- Rata						5

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa penilaian ketersediaan panjang jalan yaitu 421 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada apabila 70% – 100% maka skor yang diberikan adalah 5.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat ketersediaan jaringan Jalan di Desa Bente adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan sangat tinggi.

2. Jaringan Air Bersih

Dalam kehidupan sehari-hari, air bersih merupakan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi. Hampir semua kegiatan masyarakat menggunakan air bersih, tak terkecuali masyarakat di Desa Bente. untuk mengetahui tingkat ketersediaan jaringan air bersih, maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Persentase (\%)} \text{ kawasan permukiman} &= \frac{\text{ketersediaan}}{\text{Jumlah Pembiat}} \times 100 \\ &= \frac{16}{667} \times 100 \\ &= 2 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Persentase (\%)} \text{ kawasan perkantoran} &= \frac{\text{ketersediaan}}{\text{Jumlah Pembiat}} \times 100 \\ &= \frac{4}{37} \times 100 \\ &= 11 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Persentase (\%)} \text{ kawasan pendidikan} &= \frac{\text{ketersediaan}}{\text{Jumlah Pembiat}} \times 100 \\ &= \frac{1}{1} \times 100 \\ &= 100 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Persentase (\%)} \text{ kawasan peribadatan} &= \frac{\text{ketersediaan}}{\text{Jumlah Pembiat}} \times 100 \\ &= \frac{1}{1} \times 100 \\ &= 100 \%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa ketersediaan jaringan air bersih di Desa bente untuk kawasan permukiman sebesar 2 %, kawasan perkantoran sebesar 11 %, kawasan Pendidikan sebesar 100 %, dan kawasan peribadatan sebesar 100 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 18 berikut ini :

Tabel 18.
Ketersediaan Jaringan Air Bersih

No.	Bidang Pelayanan	SPM		Jumlah Ideal	Ketersediaan	Penilaian	Skor
		Tingkat pelayanan	Cakupan				
1.	Permukiman	Tersedia layanan Pipa PDAM 667 KK	Setiap 1 jiwa membutuhkan 60 liter/hari	667 KK	16 KK	2 %	1
2.	Perkantoran	Tersedia layanan Pipa PDAM 37 instansi	1 unit kantor membutuhkan 1000 liter/hari	37 Instansi	4 Instansi	11 %	1
3.	Pendidikan	Tersedia layanan Pipa PDAM 1 sekolah	Membutuhkan 10 liter/orang/hari	1 sekolah	1 sekolah	100 %	5
4.	Peribadatan	Tersedia layanan Pipa PDAM 1 Mesjid	• Mesjid membutuhkan 3500 liter/unit/hari	1 mesjid	1 mesjid	100 %	5
Penilaian							56 %
Jumlah							12
Nilai Rata- rata							3

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa penilaian ketersediaan Jaringan air bersih di kawasan permukiman Desa Bente yaitu 2 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0 %- 39,99 % maka skor penilaian yang diberikan adalah 1. Kawasan perkantoran yaitu 11 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0 %- 39,99 % maka skor penilaian yang diberikan adalah 1. Kawasan pendidikan yaitu 100 % dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70 %- 100% maka skor penilaian yang diberikan adalah 5. Kawasan peribadatan yaitu 100 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70 %- 100 % maka skor penilaian yang diberikan adalah 5.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat ketersediaan jaringan air bersih di Desa Bente adalah 12 dengan nilai rata-rata 3 atau dikategorikan sedang.

3. Jaringan Listrik

Sama halnya dengan air bersih, dalam kehidupan sehari-hari listrik merupakan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi. Hampir semua kegiatan masyarakat menggunakan listrik, tak terkecuali masyarakat di Desa Bente. untuk menghitung jumlah kebutuhan jaringan listrik di Desa Bente maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut :

Persentase (%) kawasan permukiman

type kecil sedang

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ketersediaan}}{\text{Jumlah Pembai}} \times 100 \\
 &= \frac{398700}{398700} \times 100 \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Persentase (%) Kawasan permukiman

$$\begin{aligned} \text{type Besar} &= \frac{\text{ketersediaan}}{\text{Jumlah Pembai}} \times 100 \\ &= \frac{288.600}{288.600} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase (\%)} \text{ Kawasan perkantoran} &= \frac{\text{ketersediaan}}{\text{Jumlah Pembai}} \times 100 \\ &= \frac{53.500}{55.500} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase (\%)} \text{ Kawasan perdagangan} &= \frac{\text{ketersediaan}}{\text{Jumlah Pembai}} \times 100 \\ &= \frac{37.500}{37.500} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase (\%)} \text{ Kawasan pendidikan} &= \frac{\text{ketersediaan}}{\text{Jumlah Pembai}} \times 100 \\ &= \frac{1500}{1500} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase (\%)} \text{ Kawasan peribadatan} &= \frac{\text{ketersediaan}}{\text{Jumlah Pembai}} \times 100 \\ &= \frac{1500}{1500} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase (\%)} \text{ Penerangan jalan} &= \frac{\text{ketersediaan}}{\text{Jumlah Pembai}} \times 100 \\ &= \frac{189,633}{139,633} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa ketersediaan kebutuhan jaringan listrik di Desa bente untuk kawasan permukiman type kecil sedang sebesar 100 %, kawasan permukiman type besar sebesar 100 %, kawasan Perkantoran sebesar 100 %, kawasan perdagangan dan jasa sebesar 100%,

kawasan Pendidikan sebesar 100 %, dan kawasan peribadatan sebesar 100 %.

Sedangkan Penerangan jalan sebesar 100 % Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini :

Tabel 19.
Ketersediaan Kebutuhan Jaringan Listrik

No.	Bidang Pelayanan	Standar Pelayanan		Jumlah Ideal	Ketersediaan		Penilaian	Skor
		Cakupan	Intensitas pelayanan		Cakupan	Intensitas Layanan		
1	Permukiman	Type kecil dan sedang membutuhkan energi listrik sebesar 900 watt/unit	<ul style="list-style-type: none"> • 24 jam tinggi • 12 jam sedang 	443 KK/ 24 jam	443 KK	24 jam	100 %	5
		Type besar membutuhkan energi listrik sebesar 1.300 watt/unit	<ul style="list-style-type: none"> • 6 jam rendah 	222 KK/ 24 jam	222 KK	24 jam	100 %	5
2	Perkantoran	Mebutuhkan daya 1500 watt /unit	<ul style="list-style-type: none"> • 24 jam tinggi • 12 jam sedang • 6 jam rendah 	37 unit/ 24 jam	37 unit	24 jam	100 %	5
3	Perdagangan	Mebutuhkan daya 1500 watt /unit	<ul style="list-style-type: none"> • 24 jam tinggi • 12 jam sedang • 6 jam rendah 	25 unit/ 24 jam	25 unit	24 jam	100 %	5

4	Pendidikan	Mebutuhkan daya 1500 watt /unit	<ul style="list-style-type: none"> • 24 jam tinggi • 12jam sedang • 6 jam rendah 	1 unit/ 24 jam	1 unit	24 jam	100 %	5
5	Peribadatan	Mebutuhkan daya 1500 watt /unit	<ul style="list-style-type: none"> • 24 jam tinggi • 12 jam sedang • 6 jam rendah 	1 unit / 24 jam	1 unit	24 jam	100 %	5
6	Penerangan Jalan	Mebutuhkan 10 % dari kebutuhan	12 jam	139,63 3 watt/ 12 jam	139,633 watt	12 jam	100 %	5
Penilaian								100%
Jumlah Skor								30
Nilai Rata- Rata								5

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa penilaian ketersediaan Kebutuhan Jaringan listrik di kawasan permukiman type kecil sedang di Desa Bente yaitu 100%, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70 %- 100 % maka skor penilaian yang diberikan adalah 5, permukiman type besar di Desa Bente yaitu 100%, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70 %- 100 % maka skor penilaian yang diberikan adalah 5. Kebutuhan listrik di kawasan perkantoran yaitu 100 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70 %- 100 % maka skor penilaian yang diberikan adalah 5. Kebutuhan listrik di kawasan perdagangan yaitu 100 % dan berdasarkan pada

pedoman yang ada, apabila 70 %- 100% maka skor penilaian yang diberikan adalah 5. Kebutuhan listrik di kawasan pendidikan yaitu 100 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70 %- 100 % maka skor penilaian yang diberikan adalah 5. Kebutuhan listrik di kawasan peribadatan yaitu 100 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70 %- 100 % maka skor penilaian yang diberikan adalah 5. Sedangkan penerangan Jalan yaitu 100 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70 %- 100 % maka skor penilaian yang diberikan adalah 5 dengan intensitas pelayanan 24 jam.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat ketersediaan kebutuhan jaringan listrik di Desa Bente adalah 30 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan sangat tinggi.

4. Jaringan Drainase

Jaringan drainase memiliki peranan penting untuk mengalirkan air dari hulu ke hilir yang berfungsi lain untuk mencegah dan mengurangi terjadi banjir disuatu daerah.

Sesuai dengan ketersediaan panjang drainase di ketahui bahwa panjang drainase di Desa Bente adalah 7,7 km. Sedangkan panjang jaringan jalan yang adalah 27,81 km untuk mengetahui tingkat ketersediaan Jaringan drainase, maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase (\%)} &= \frac{\text{panjang drainase}}{SPM} \times 100 \\
 &= \frac{7700}{55620} \times 100 \\
 &= 14 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa persentase ketersediaan panjang drainase di Desa Bente yaitu 14 %, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 20 berikut ini :

Tabel 20.
Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Drainase

No	Uraian	Standar SPM	Jumlah Ideal	Ketersediaan	Penilaian	Skor
1	Jaringan Drainase	55620 m	55620 m	7700 m	14 %	1
Penilaian						14 %
Jumlah Skor						1
Nilai Rata- Rata						1

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017

Berdasarkan Tabel dan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa penilaian ketersediaan jaringan drainase yaitu 14 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0 % -39,99% maka skor yang diberikan adalah 1.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat ketersediaan jaringan drainase di Desa Bente adalah 1 dengan nilai rata-rata 1 atau dikategorikan rendah.

5. Sistem Persampahan

Sistem persampahan di Desa Bente masyarakat masih menggunakan sistem individual, namun untuk kawasan perkantoran ,dan fasilitas kesehatan yang berada di Desa Bente sudah terdapat 3 TPS , sedangkan untuk sistem pengelolaan sampah di Desa Bente, untuk tahap pengumpulan masih bersifat komunal, belum ada yang bersifat door to door Sistem pengolahan persampahan yang buruk memiliki dampak yang buruk bagi manusia dan lingkungan hal ini dapat menyebabkan terjadi berbagai macam penyakit serta terjadinya bencana alam banjir apabila sampah bertumpuk disekitaran sungai, maka dari itu butuh pengelolaan yang baik tak terkecuali di Desa Bente. SPM untuk kontainer sampah adalah 1 kontainer melayani 1000 KK. Sementara hasil survey lapangan dan data dari Dinas Lingkungan Hidup serta data dari hasil survey tahun 2017. untuk mengetahui tingkat ketersediaan sistem persampahan, maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Persentase (\%) TPS} &= \frac{\text{ketersediaan}}{\text{SPM}} \times 100 \\ &= \frac{450}{667} \times 100 \\ &= 67 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Persentase (\%) Gerobak sampah} &= \frac{\text{ketersediaan}}{\text{SPM}} \times 100 \\ &= \frac{0}{667} \times 100 \\ &= 0 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Persentase (\%) Kontainer} &= \frac{\text{ketersediaan}}{\text{SPM}} \times 100 \\ &= \frac{1000}{667} \times 100 \\ &= 149 \%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas mengenai sistem sarana persampahan untuk TPS sebanyak 67 %. Gerobak sampah 0 %, kontainer 149 %, sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan sampah sebesar 0 % Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 21 berikut

Tabel 21.
Hasil Analisis Ketersediaan Sistem Persampahan

No	Uraian	Standar SPM	Jumlah Ideal	Ketersediaan	Penilaian	Skor
1.	Sistem sarana Persampahan	1 unit TPS melayani 40 liter/150KK	4 TPS	3 TPS	67 %	3
		1 unit gerobak sampah melayani 1000 liter/200 KK	3 unit gerobak	-	0 %	1
		1 unit kontainer melayani 8000 liter/1000KK	1 unit kontainer	1 unit kontainer	149 %	5
2.	Sistem pengangkutan Sampah	Pengambilan sampah 1 minggu 3 kali	Pengambilan sampah 1 minggu 3 kali	Masih bersifat individual dan belum dilakukan pengangkutan sampah	0 %	1
Penilaian						54 %
Jumlah Skor						10
Nilai rata						2

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa persentase ketersediaan sistem sarana persampahan untuk TPS sebanyak 67 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 39,99% - 69,99% maka skor yang diberikan adalah 3. Gerobak sampah 0 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0 % -39,99% maka skor yang diberikan adalah 1. kontainer 149

%, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70 % -100 % maka skor yang diberikan adalah 5 .sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan sampah sebesar 0 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0 % - 39,99% maka skor yang diberikan adalah 1.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat ketersediaan sistem persampahan di Desa Bente adalah 9 dengan nilai rata-rata 2 atau dikategorikan rendah.

6. Aksesibilitas

Berdasarkan dari hasil survey yang dilakukan aksesibilitas jarak tempuh kawasan perkantoran ke ibu kota Kecamatan yaitu 11 km/jam dengan kondisi jaringan jalan sangat baik , aksesibilitas jarak tempuh kawasan perkantoran ke pelabuhan Bungku yaitu 10 km, dengan kondisi jaringan jalan sangat baik, aksesibilitas jarak tempuh kawasan perkantoran ke terminal dan yaitu 8 km, dengan kondisi jaringan jalan sangat baik. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 22 sebagai berikut:

Tabel 22.
Hasil Analisis Ketersediaan Tingkat Aksesibilitas Tahun 2017

No	Rute aksesibilitas	SPM		Ketersediaan		Penilaian	Skor
		Panjang/jarak jalan	Kondisi Jalan	Panjang/jarak jalan	Kondisi jalan		
1	Rute Ibukota Kecamatan ke Kawasan Perkantoran	11 Km	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Sedang • Buruk 	11 Km	baik	100 %	5
2	Rute Pelabuhan ke Kawasan Perkantoran	10 Km	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Sedang • Buruk 	10 Km	baik	100%	5
3	Terminal ke kawasan perkantoran	8 Km	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Sedang • Buruk 	8 Km	baik	100%	5
Penilaian							100%
Jumlah skor							15
Nilai Rata- Rata							5

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017

Berdasarkan tabel diketahui bahwa Untuk kualitas jalan di Desa sangat baik berdasarkan pedoman yang ada jika kualitas jalan sangat baik maka nilai presentase yang diberikan adalah 70 %- 100% dan skor yang diberikan adalah 5.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat ketersediaan tingkat aksesibilitas di Desa Bente adalah 15 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan sangat tinggi.

F. Rekapitulasi Hasil Ketersediaan Infrastruktur pada lokasi penelitian

Untuk mengetahui tingkat ketersediaan infrastruktur di Desa Bente maka di lakukan rekapitulasi hasil ketersediaan infrastruktur , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 23 berikut ini :

Tabel 23.
Hasil Rekapitulasi ketersediaan infrastruktur

No	Uraian Infrastruktur	Penilaian	Skor	Kategori
1.	Jaringan Jalan	421 %	5	Sangat Tinggi
2.	Jaringan Air Bersih	56 %	3	Sedang
3.	Jaringan Listrik	100 %	5	Sangat Tinggi
4.	Jaringan Drainase	14 %	1	Rendah
5.	Sistem Persampahan	54 %	2	Rendah
6.	Aksesibilitas	100 %	5	Sangat Tinggi
Jumlah		124 %	21	-
Nilai rata- rata			3	
Kategori			Sedang	

Sumber : Hasil Analisis ketersediaan infrastruktur Tahun 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa hasil rekapitulasi ketersediaan infrastruktur secara keseluruhan di Desa Bente memiliki penilaian 124 % dengan jumlah skor 21 dengan nilai rata- rata 3, dan sesuai dengan pedoman yang ada dapat dikategorikan sedang.

G. Pengaruh Pengembangan Ruang Kawasan Perkantoran Terhadap Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Pada Lokasi Penelitian

Pengaruh pengembangan ruang Kawasan perkantoran terhadap pembangunan infrastruktur sudah sangat signifikan hal ini berdasarkan hasil perhitungan menggunakan analisis pembobotan yang disesuaikan dengan standar pelayanan minimum (SPM) tahun 2014, untuk lebih jelasnya dapat dilihat penjelasan berikut ini :

1. Jaringan Jalan

Berdasarkan hasil analisis dan penjabaran mengenai ketersediaan infrastruktur jaringan jalan pada kawasan penelitian di peroleh nilai/skor sebesar 5 dengan persentase sebesar 421%, dengan demikian bahwa pembangunan infrastruktur jaringan jalan sangat dipengaruhi oleh kawasan perkantoran yang pada kawasan penelitian. Dengan berdasar pada hal tersebut baik itu ketersediaan infrastruktur maupun pengaruhnya terhadap kawasan perkantoran maka pengembangan infrastruktur jaringan diarahkan pada pemeliharaan dengan mempertahankan kualitas kondisi infrastruktur jaringan jalan yang ada.

2. Jaringan Air Bersih

Berdasarkan pada hasil analisis dan pengolahan data mengenai infrastruktur jaringan air bersih yang terbagi atas 4 bidang pelayanan yang masing-masing adalah permukiman, pendidikan, perkantoran dan peribadatan, maka diperoleh hasil skor rata-rata sebesar 3 dengan kategori sedang dan persentase sebesar 56%. Dengan demikian bahwa pengembangan infrastruktur jaringan air bersih cukup dipengaruhi (pengaruh sedang) oleh keberadaan kawasan perkantoran di wilayah

penelitian. Dengan demikian maka pengembangan infarastruktur jaringan air bersih diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan khususnya pada bidang pelayanan kawasan permukiman dan kawasan perkantoran.

3. Jaringan Listrik

Berdasarkan hasil analisis dan penjabaran mengenai ketersediaan infrastruktur jaringan listrik pada kawasan penelitian di peroleh nilai/skor sebesar 5 dengan persentase sebesar 100%, dengan demikian bahwa pembangunan infrastruktur jaringan listrik sangat dipengaruhi oleh kawasan perkantoran yang pada kawasan penelitian. Dengan berdasar pada hal tersebut baik itu ketersediaan infrastruktur maupun pengaruhnya terhadap kawasan perkantoran maka pengembangan infrastruktur jaringan listrik diarahkan pada pemeliharaan dengan mempertahankan kualitas kondisi infrastruktur jarungan listrik yang ada.

4. Jaringan Drainase

Berdasarkan pada hasil analisis dan pengolahan data mengenai infrasruktur jaringan drainase maka diperoleh hasil skor rata-rata sebesar 1 dengan kategori rendah dan persentase sebesar 14%. Dengan demikian bahwa pengembangan infrastruktur jaringan drainase tidak cukup terpengaruh (pengaruh rendah) oleh keberadaan kawasan perkantoran di wilayah penelitian. Dengan demikian maka pengembangan infarastruktur jaringan drainase diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan yang ada.

5. Sistem persampahan

Berdasarkan pada hasil analisis dan pengolahan data mengenai infrastruktur sistem persampahan yang terbagi atas 2 bidang pelayanan yang masing-masing adalah sistem sarana persampahan, dan sistem pengangkutan sampah maka diperoleh hasil skor rata-rata sebesar 2 dengan kategori rendah dan persentase sebesar 54%. Dengan demikian bahwa pengembangan infrastruktur sistem persampahan tidak cukup terpengaruhi (pengaruh rendah) oleh keberadaan kawasan perkantoran di wilayah penelitian. Dengan demikian maka pengembangan sistem persampahan untuk bidang sistem sarana persampahan diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana persampahan seperti gerobak sampah, jumlah TPS, dan pengadaan truck sampah. Sedangkan untuk bidang sistem pengangkutan sampah diarahkan pada pengangkutan atau pengambilan sampah minimal 1 minggu 3 kali kalipada lokasi kawasan penelitian.

6. Aksesibilitas

Berdasarkan hasil analisis dan penjabaran mengenai ketersediaan infrastruktur kondisi jalan pada kawasan penelitian di peroleh nilai/skor sebesar 5 dengan persentase sebesar 100%, dengan demikian bahwa pembangunan infrastruktur kondisi jalan sangat dipengaruhi oleh kawasan perkantoran yang pada kawasan penelitian. Dengan berdasar pada hal tersebut baik itu ketersediaan infrastruktur maupun pengaruhnya terhadap kawasan perkantoran maka pengembangan kondisi jaringan jalan diarahkan pada pemeliharaan dengan mempertahankan kualitas kondisi infrastruktur jaringan jalan yang ada.

H. Kajian Hukum Islam Tentang Pengaruh Pengembangan Ruang Kawasan Perkantoran Terhadap Pembangunan Infrastruktur Lingkungan

Tahir 2010 dalam Catanesey, Anthony J., dan Jamse C.S (1979:120) bahwa keberadaan infrastruktur mempunyai dampak yang sangat besar bagi mutu kehidupan masyarakat, pola pertumbuhan dan prospek perkembangan ekonominya. Selain itu pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi sumberdaya alam akan mampu mempercepat pengembangan wilayah .Sutami (1970).

Sebagaimana Allah SWT menciptakan langit secara terstruktur dimana didalam struktur tersebut terdapat unsur- unsur yang saling membentuk yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama sehingga membentuk suatu sistem yang kokoh sehingga kehidupan tetap berjalan. Jika salah satu unsur tersebut terjadi kerusakan maka terjadi malapetaka begitupun struktur ruang dimana merupakan kumpulan pusat - pusat permukiman sistem jaringan infrastruktur yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Qaf/50:6 - 8 yaitu :

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ
 ٦ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
 ٧ بَهِيجٍ ٨ تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ٩

Terjemahnya:

“Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada diatas mereka, bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya, dan tidak terdapat retak-retak sedikitpun?. Dan bumi yang Kami hamparkan dan Kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan diatasnya tanaman-tanaman yang indah , untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali (tunduk kepada Allah)”.(Kementrian Agama RI 2011 : 747-748).

Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah makna dari ayat tersebut yaitu mengajak berpikir guna menyingkirkan kebingungan. Ayat diatas menyatakan : maka apakah mereka lalai sehingga tidak melihat dengan mata kepala dan mata hati ke langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami menciptakan serta meninggikannya dan menghiasinya dengan bintang-bintang dan tiada baginya yakni di langit itu sedikitpun retak-retak yang menjadikannya cacat?Ayat diatas menyatakan : Dan apakah mereka tidak melihat bumi yang berada di sekeliling mereka, bagaimana Kami menghamparkannya dengan mantap, dan kami menancapkan padanya gunung-gunung yang kokoh sehingga ia tidak oleng oleh peredarannya dan disamping itu Kami menumbuhkan padanya segala yakni banyak macam tanaman yang indah dipandang mata. Itu semua Kami ciptakan dan atur sedemikian rupa untuk menjadi pelajaran yang mengantar kamu mengetahui betapa besar kuasa Allah SWT. Dan juga untuk menjadi peringatan bagi setiap hamba yang hendak kembali kepada Allah SWT bahwa ada hari

Pembalasan yang kami siapkan untuk setiap mereka. (Shihab, 2002 : vol.13, h.282).

Ayat di atas hendak mengingatkan semua manusia bahwa di angkasa terdapa benda-benda yang beterbangan seperti bintang-bintang dan planet. Kesemuanya beredar dengan sistem yang sangat teliti dan dengan keseimbangan yang sangat sempurna. Benda-benda itu senantiasa terpelihara posisinya sesuai dengan hukum gravitasi yang diciptakan Allah sehingga tidak akan menjadi tabrakan yang menimbulkan kekacauan dan kehancuran alam raya sampai batas waktu yang ditetapkan-Nya. Di bumi pun banyak fenomena alam yang sangat menarik sekaligus penuh dengan pelajaran bagi mereka yang hendak menggunakan walau sedikit dari nalar dan rasa yang dianugerahkan Allah padanya. (Shihab, 2002 : vol.13, h.283).

Sangat jelas penjelasan dalam Al-Qur'an tentang pentingnya ruang direncanakan secara terstruktur, rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhirarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Adanya pembangunan kawasan perkantoran di Desa Bente yang merupakan kawasan pusat pemerintahan sangat mempengaruhi perkembangan infrastruktur di Kabupaten Morowali khususnya pada Desa Bente Kecamatan Bungku tengah, hal ini disebabkan karena kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat semakin meningkat yang diakibatkan karena jumlah penduduk di kecamatan bungku tengah khususnya di Desa Bente tiap tahunnya meningkat selain itu penduduk

yang bernukim di Desa Bente didominasi oleh penduduk yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pentingnya pembangunan infrastruktur karena dapat menunjang keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan kota. Selain itu Allah SWT berfirman dalam Q.S Hashr /59:18 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝١٨

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Kementrian Agama RI 2011 : 799).

Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah makna dari ayat tersebut menjeaskan tentang orang-orang yahudi dan munafik yang kesudahan mereka adalah siksa duniawi dan ukhwari. Ayat diatas mengajak kaum muslimin untuk untuk berhati-hati jangan sampai mengalami nasib seperti mereka itu. Allah Berfirman : *Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah*, yakni hindarilah siksa yang dapat dijatuhkan Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan jalan melaksanakan perintah-Nya Sekuat kemampuan kamu dan menjauhi larangan-Nya, dan *hendaklah setiap hari memmerhatikan apa yang telah dikedepankannya*, yakni amal saleh yang telah diperbuatnya, *untuk hari esok yang dekat*, yakni akhirat.

Setelah memerintahkan bertakwa didorong oleh rasa takut, atau dalam rangka melakukan amalan positif, perintah tersebut diulangi lagi agar didorong oleh rasa malu atau untuk meninggalkan amalan negatif. Allah Berfirman : *Dan, sekali lagi kami pesankan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyangkut apa yang senantiasa dan dari saat ke saat kamu kerjakan Maha mengetahui sampai sekecil apapun.*

Kata *tuqaddimu dikedepankan* digunakan dalam arti amal-amal yang dilakukan untuk meraih manfaat di masa datang. Ini seperti hal-hal yang dilakukan terlebih dahulu guna menyambut tamu sebelum kedatangannya.

Perintah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok dipahami oleh Thabathaba'i sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Ini seperti seorang tukang yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia dituntut untuk memperhatikannya kembali agar menyempurnakannya, sehingga jika tiba saatnya diperiksa, tidak ada lagi kekurangan dan barang tersebut tampil sempurna. Setiap mukmin dituntut melakukan hal itu. Kalau baik dia dapat mengharap ganjaran dan kalau amalnya buruk, dia hendaknya segera bertaubat. Atas dasar ini pula ulama yang berkelahiran di Rappang berpendapat bahwa perintah takwa yang kedua dimaksudkan untuk perbaikan dan penyempurnaan amal-amal yang telah dilakukan atas dasar perintah takwa yang pertama.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberadaan infrastruktur mempunyai dampak yang sangat besar bagi mutu kehidupan masyarakat, pola pertumbuhan dan prospek perkembangan ekonominya. Di desa bente masih ada

beberapa pembangunan jaringan prasarana masih rendah yaitu diantaranya jaringan air bersih dan jaringan drainase. Kedua jaringan tersebut memiliki peran sangat penting bagi perkembangan suatu kota. Bagaimana telah disebutkan sebelumnya pada dalam QS Qaf/50:6 - 8 bahwa pentingnya ruang direncanakan secara terstruktur, rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhirarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Minimnya pembangunan jaringan prasarana dapat merugikan masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu Allah SWT telah memerintahkan Setiap umat muslim dituntut untuk memperhatikannya kembali agar menyempurnakannya, sehingga jika tiba saatnya diperiksa, tidak ada lagi kekurangan dan barang tersebut tampil sempurna. Setiap mukmin dituntut melakukan hal itu . kalau baik dia dapat mengharap ganjaran dan kalau amalnya buruk , dia hendaknya segera bertaubat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pembahasan pada penelitian ini ,
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketersediaan infrastruktur di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah sudah cukup memadai atau dikategorikan sedang diantaranya jaringan jalan, jaringan listrik, dan aksesibilitas tingkat ketersediannya sangat tinggi ,sedangkan jaringan air bersih tingkat ketersediaan sedang, namun untuk jaringan drainase, dan Sistem persampahan tingkat ketersediaannya masih rendah
2. Untuk pengaruh pengembangan ruang kawasan perkantoran terhadap pembangunan infrakstruktur untuk jaringan jalan, jaringan listrik, dan aksesibilitas yaitu berpengaruh sangat tinggi (pengaruh tinggi),sedangkan untuk pengembangan infrakstruktur diarahkan pada pemeliharaan dengan mempertahankan kualitas jaringan infrakstruktur yang ada , untuk infrakstruktur jaringan air bersih yaitu cukup dipengaruhi (pengaruh sedang), kemudian untuk pengembangan infrakstruktur jaringan air bersih diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan khususnya pada bidang pelayanan kawasan permukiman dan kawasan perkantoran. Sedangkan untuk infrakstruktur jaringan drainase dan sistem persampahan memiliki pengaruh tidak cukup terpengaruhi (pengaruh rendah), sedangkan untuk pengembangan jaringan drainase diarahkan jaringan drainase diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan yang ada . kemudian untuk pengembangan

sistem persampahan diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana persampahan seperti gerobak sampah, jumlah TPS, dan pengadaan truck sampah. dan untuk bidang sistem pengangkutan sampah diarahkan pada pengangkutan atau pengambilan sampah minimal 1 minggu 3 kali kalipada lokasi kawasan.

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu pihak pemerintah daerah kabupaten morowali dalam hal mengetahui ketersediaan jaringan prasarana yang ada di Kecamatan Bungku Tengah khususnya di Desa Bente dan dapat mengetahui pentingnya pengembangan kawasan perkantoran terhadap pembangunan infrastuktur serta memberikan fasilitas persampahan yaitu bak sampah atau kontainer di lingkungan kawasan permukiman agar sistem persampahan pada lingkungan permukiman akan beralih ke sistem persampahan komunal karena sistem persampahan secara individual dapat menyebabkan tingginya tingkat kekumuhan suatu daerah seta menghasilkan polusi karena asap dari pembakaran sampah tersebut serta mempercepat pembangunan kawasan tempat pemrosesan akhir (TPA)
2. Dengan penelitian diharapkan pemerintah Kabupaten Morowali dapat meningkatkan infrakstruktur khusus jaringan drainase sehingga tidak menimbulkan genangan yang dapat menimbulkan banjir dan sumber penyakit di saat musim hujan.
3. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penenliti selanjutnya yang akan membahas mengenai infrakstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- AS,Nursyam. Struktur Tata Ruang Wilayah dan Kota.Alauddin university pres. Makassar. 2013
- Dinas Lingkungan Hidup , tentang Laporan Akhir Penyusunan PTPM Kabupaten Morowali Tahun 2016.
- Dinas Kependudukan dan Capil , tentang perkembangan jumlah penduduk di kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Tahun 2017.
- Ernan Rustiadi, Sunsun Saeful Hakim, dan Dyah R. Panuju. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Edisi kedua, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.2011.
- Firdaus, Muhammad, and Rindang Bangun Prasetyo. "Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia". 2009.
- Hapsari, Tanjung.“Pengaruh Infrakstruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”. Skripsi.Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2011.
- Jahid, Jamaluddin. Kapita Selekta Perencanaan Wilayah. Makassar : Alauddin University Pres.2012
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta : Sukses publising.2011.
- Kabupaten Morowali Dalam Angka. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali : Morowali,2015
- Meiriki,Andri. “Analisis Pusat Pemerintahan dan Pemilihan Pusat Pertumbuhan yang Optimal Dalam Pengembangan Wilayah”. Tesis Deepublish. Bogor: Institut Pertanian Bogor,2004.
- Panjaitan, P (2012)”Analisis pengaruh infrakstruktur jalan terhadap investasi, ekspor, dan PDRB Provinsi Sumatera Utara”, Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Morowali No 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2012- 2032
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota
- Shihab M.Quraish. *Tafsir, Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta ,Lentera Hati :2002.

Thaher, Maas Syabirin (2010) Pengembangan infrastruktur kampung nelayan malabero di kawasan wisata pantai tapak paderi Kota Bengkulu. Masters tesis, Universitas Diponegoro.

UIN Alauddin Makassar Press, 2013, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Alauddin Press, Makassar.

Wijaya, Bayu, and Hastarini Dwi Atmanti. "Analisis pengembangan wilayah dan sektor potensial guna mendorong pembangunan di Kota Salatiga." *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)* 3.Nomor 2 (2006): 101-118.

<https://perencanaankota.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-dan-fungsi-kota-baru.html>. teori Soejarto(1993) kota baru diakses pada tanggal 12 bulan Oktober 2016.

<https://notestalk.wordpress.com/2009/10/29/konsep-wilayah-dan-pusat-pertumbuhan-pengembangan-wilayah/> diakses pada tanggal 12 bulan Oktober 2016.



A. Riwayat Hidup



Muhammad Farid A.W. Hasan dilahirkan di, Makassar pada tanggal 26 Desember 1993 oleh pasangan suami istri Drs H. Abd Wahid Hasan M.Pd dan Dra. Hj. Marhani Dollah pendidikannya di TK IAIN Alauddin , kemudian Lulus di SDN Paccinongan Unggulan Kabupaten Gowa , selanjutnya di MTSN Model Makassar hingga kelas 3 dan pindah di SMP Negeri 1 Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, setelah itu

melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bungku Tengah Kabupaten Morowali dan lulus pada tahun 2012. Penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar Pada Tahun 2012. Dan melalui proses orientasi selama satu tahun. Penulis menyadari tugas akhir dengan judul *Pengaruh pengembangan Ruang Kawasan Perkantoran Terhadap Pembangunan infrastruktur Lingkungan Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali (Studi Kasus Kawasan Perkantoran Bumi Fonuansingko Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali)* ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih butuh perbaikan. maka dari itu apabila ada kritikan dan saran, pembaca bisa mengirimkan pesan ke alamat email berikut faridawhasan@gmail.com.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R